



BUKU 3

PETA RENCANA

SPBE



2024 - 2028

PEMERINTAH KABUPATEN
TASIKMALAYA

Daftar Isi

Bab I Analisis Kesenjangan	4
1.1. Analisis Kesenjangan & Inisiatif Program Proses Bisnis SPBE	5
1.2. Analisis Kesenjangan & Inisiatif Program Data dan Informasi	6
1.3. Analisis Kesenjangan & Inisiatif Program Layanan	7
1.4. Analisis Kesenjangan & Inisiatif Program Aplikasi SPBE	8
1.5. Analisis Kesenjangan & Inisiatif Program Infrastruktur SPBE	9
1.6. Analisis Kesenjangan & Inisiatif Program Keamanan Informasi SPBE	13
Bab II Portofolio Inisiatif Indeks SPBE	15
2.1. Tata Kelola	16
2.1.1. Kebijakan Arsitektur SPBE (PR-T-001)	16
2.1.2. Kebijakan Peta Rencana SPBE (PR-T-002)	16
2.1.3. Kebijakan Manajemen Data (PR-T-003)	17
2.1.4. Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE (PR-T-004)	17
2.1.5. Kebijakan Pusat Data (PR-T-005)	18
2.1.6. Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah (PR-T-006)	18
2.1.7. Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat (PR-T-007)	19
2.1.8. Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi (PR-T-008)	20
2.1.9. Kebijakan Internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (PR-T-009)	20
2.1.10. Kebijakan Tim Koordinasi (PR-T-010)	21
2.1.11. Pembentukan Komite/Forum SPBE (PR-T-011)	21
2.1.12. Kolaborasi Penerapan SPBE (PR-T-012)	22
2.1.13. Evaluasi dan Revisi Tata Kelola SPBE (PR-T-013)	23
2.2. Manajemen SPBE	23
2.2.1. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Risiko (PR-M-001)	23
2.2.2. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi (PR-M-002)	24
2.2.3. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Data (PR-M-003)	25
2.2.4. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Aset TIK (PR-M-004)	26
2.2.5. Penyusunan dan Penerapan Manajemen SDM TIK (PR-M-005)	26
2.2.6. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Pengetahuan (PR-M-006)	29
2.2.7. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Perubahan (PR-M-007)	30
2.2.8. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Layanan TIK (PR-M-008)	30
2.3. Layanan SPBE	31
2.3.1. Pengembangan Layanan RB Tematik (PR-L-001)	31
2.3.2. Pengembangan Layanan Prioritas SPBE (PR-L-002)	32
2.3.3. Pengembangan Portal Layanan Terintegrasi (PR-L-003)	34
2.3.4. Pengembangan Platform Helpdesk TIK (PR-L-004)	36
2.3.5. Survey Pengguna Layanan (PR-L-004)	37
2.4. Aplikasi SPBE	38
2.4.1. Pengembangan Aplikasi (PR-A-001)	38
2.4.2. Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (API Gateway) (PR-A-002)	39
2.4.3. Pengembangan Portal Data dan Dashboard (Big Data) (PR-A-003)	40

2.4.4. Pemeliharaan Aplikasi (PR-A-004)	40
2.5. Infrastruktur SPBE	41
2.5.1. Peningkatan Kapasitas Ruang dan Fasilitas Pendukung Pusat Data (PR-I-001)	41
2.5.2. Penyusunan Rencana Kapasitas (Capacity Plan) Infrastruktur Utama Server dan Storage (PR-I-002)	42
2.5.3. Pengadaan Pusat Pemulihan Bencana (PR-I-003)	43
2.5.4. Uji Coba Pemulihan Bencana Secara Periodik (PR-I-004)	44
2.5.5. Peningkatan Kapasitas dan Keandalan Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah (PR-I-005)	45
2.5.6. Pemeliharaan Jaringan Dalam Kab Interkoneksi Perangkat Daerah/UPT (PR-I-006)	45
2.5.7. Pengembangan Infrastruktur Jaringan Data Nirkabel (WiFi) Terintegrasi (PR-I-007)	46
2.5.8. Pembangunan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) (PR-I-008)	48
2.6. Keamanan Informasi	49
2.6.1. Penyusunan Kebijakan dan Manajemen Keamanan SPBE (PR-K-001)	49
2.6.2. Penyusunan SOP Keamanan Data dan Informasi (PR-K-002)	50
2.6.3. Penyusunan SOP Keamanan Aplikasi SPBE (PR-K-003)	51
2.6.4. Penyusunan SOP Keamanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (PR-K-004)	53
2.6.5. Penyusunan SOP Keamanan Jaringan Intra Pemerintah (PR-K-005)	54
2.6.6. Sertifikasi Standar Keamanan Informasi (Indeks KAMI/ ISO 27001) (PR-K-006)	55
2.6.7. Penilaian Kerentanan dan Pengujian Penetrasi (PR-K-007)	56
2.6.8. Edukasi dan Sosialisasi Keamanan SPBE (PR-K-008)	57
2.7. Audit SPBE	57
2.7.1. Pelaksanaan Audit TIK (PR-AT-001)	57
Bab III Peta Rencana SPBE	59
3.1. Penyelarasan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya 2024-2028	60
3.2. Peta Rencana Pemenuhan Indeks SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya 2024-2028	93
Bab IV Penutup	110
LAMPIRAN	112

Bab I Analisis Kesenjangan

1.1. Analisis Kesenjangan & Inisiatif Program Proses Bisnis SPBE

Analisis kesenjangan memerlukan peninjauan menyeluruh terhadap beberapa aspek kunci. Aspek kesenjangan proses bisnis Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya selanjutnya dianalisis untuk diidentifikasi beberapa inisiatif yang dapat diambil untuk mensimplifikasi proses bisnis SPBE di Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan digitalisasi. Adapun hasil analisis gap dan inisiatif program atau rekomendasi proses bisnis Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut.

Tabel 1.1.1. Analisis GAP dan Rekomendasi Proses Bisnis Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya

No	Kondisi Saat Ini	Kondisi Target	Analisis GAP	Rekomendasi
1	Proses bisnis masih perlu evaluasi dan Penyesuaian setiap tahunnya, karena mengingat probisnya disusun pada tahun 2020	Pengurangan alur proses bisnis guna mewujudkan pelayanan yang <i>seamless</i> dan efektif dan penyesuaian tugas dan fungsi perangkat daerah yang sesuai	Perlu adanya inovasi proses bisnis dengan cara melakukan simplifikasi proses (aktivitas) dan otomatisasi dengan digitalisasi.	<i>Mindset</i> digitalisasi yang berbasis pada simplifikasi dan efisiensi proses bisnis.
2	Proses bisnis masih belum in-line dengan kode referensi SPBE Nasional khususnya RAB Level 3.	Proses bisnis Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya perlu di <i>cascading</i> mengacu pada referensi SPBE Nasional yang diturunkan dari RAB Level 3.	Perlu peninjauan proses bisnis berdasarkan referensi SPBE Nasional dan menunjukkan keterlibatan <i>stakeholder</i> eksternal secara lengkap.	<i>Cascading</i> peta proses bisnis yang mengacu pada referensi SPBE Nasional dengan penginputan data ke SIA SPBE versi 2.0

Hasil analisis gap dan inisiatif proses bisnis Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya diharapkan dapat menggambarkan kondisi *eksisting* Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya saat ini sehingga inisiatif program atau rekomendasi dapat tepat sasaran atau sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Merujuk pada Tabel 1.1.1, menunjukkan bahwa pemetaan proses bisnis utama masih berbasis pada pelaksanaan di tahun 2020 dan pemetaan proses bisnis ini perlu evaluasi setiap tahunnya agar sesuai dengan tahun berjalan, serta proses bisnis masih belum *in-line* dengan kode referensi SPBE Nasional khususnya RAB Level 3. Oleh karena itu, diperlukan *evaluasi* peta proses bisnis lintas fungsi, *mindset* digitalisasi yang berbasis pada simplifikasi dan efisiensi proses bisnis, serta *cascading* peta proses bisnis yang mengacu pada referensi SPBE Nasional dengan penginputan data ke SIA SPBE versi 2.0. Dengan demikian, rekomendasi utama adalah untuk memperbarui dan menyederhanakan proses bisnis agar lebih terstruktur, efisien, dan selaras dengan standar nasional serta mengadopsi teknologi digital untuk peningkatan layanan yang lebih baik. Dengan mengatasi kesenjangan-kesenjangan ini, diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dapat mengimplementasikan SPBE secara lebih efektif dan efisien, serta mendukung tugas dan fungsinya secara optimal.

1.2. Analisis Kesenjangan & Inisiatif Program Data dan Informasi

Analisis kesenjangan memerlukan peninjauan menyeluruh terhadap beberapa aspek kunci. Aspek kesenjangan data dan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya selanjutnya dianalisis untuk diidentifikasi beberapa inisiatif yang dapat diambil untuk dapat ditindaklanjuti. Adapun hasil analisis gap dan inisiatif program atau rekomendasi data dan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut.

Tabel 1.2.1. Analisis GAP dan Rekomendasi Data dan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya

No	Kondisi saat ini	Kondisi Target	Analisis GAP	Rekomendasi
1	Infrastruktur IT belum memadai untuk mendukung proses digitalisasi dan analisis data dalam skala besar.	Mengembangkan kapasitas <i>server</i> , <i>storage</i> dan jaringan sesuai dengan kebutuhan	Keterbatasan kapasitas penyimpanan, komputasi, dan jaringan yang menghambat pengolahan dan penyimpanan data yang besar dan kompleks.	Pengembangan Kapasitas Infrastruktur
2	Data antar unit dan sektor belum terintegrasi, banyak terjadi duplikasi dan data tidak sinkron antar instansi.	Sistem pengelolaan data yang terintegrasi antar unit dan sektor, dengan satu sumber data utama (<i>single source of truth</i>).	Tidak adanya integrasi data menyebabkan pengambilan keputusan yang lambat dan kurang akurat akibat data yang terfragmentasi.	Implementasi platform data terintegrasi yang memungkinkan berbagi data antar unit kerja serta pembentukan pusat data yang menjadi referensi tunggal bagi seluruh instansi.
3	Analisis data terbatas pada laporan rutin dan bersifat statis sehingga tidak cukup cepat untuk menangani perubahan dinamis di lapangan.	Perlunya pembangunan <i>initial data analytic</i> , seperti: visualisasi, tabular, <i>chart</i> , dan pivot data	Keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia dalam mengolah data secara <i>real-time</i> .	Pengembangan <i>Data Analytic</i>
4	Pemantauan kualitas data belum optimal, tidak ada mekanisme evaluasi reguler terhadap validitas dan konsistensi data.	Sistem pemantauan dan evaluasi data yang otomatis, dengan mekanisme kontrol kualitas data yang teratur dan sistematis.	Data yang tidak terpantau secara konsisten dapat menimbulkan masalah kualitas, akurasi, dan relevansi data dalam jangka panjang.	Penerapan mekanisme pemantauan otomatis dan audit kualitas data secara berkala untuk memastikan keakuratan, relevansi, dan konsistensi data.

Hasil analisis gap data dan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya diharapkan dapat menggambarkan kondisi *eksisting* Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya saat ini sehingga inisiatif program atau rekomendasi dapat tepat sasaran atau sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Secara umum, kesimpulan dari tabel analisis di atas adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya perlu melakukan berbagai pengembangan, termasuk meningkatkan interoperabilitas data sektoral, mengembangkan kemampuan analitik data, meningkatkan kapasitas infrastruktur IT, dan memperkuat penerapan ilmu data lanjutan seperti *Data Science*. Langkah-langkah ini diperlukan untuk mengoptimalkan penggunaan Data dan Informasi pada

perangkat daerah, dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan dan berbagi data dan informasi.

1.3. Analisis Kesenjangan & Inisiatif Program Layanan

Analisis kesenjangan dan inisiatif program layanan merupakan langkah penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi layanan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Analisis kesenjangan berisikan asesmen berdasarkan permasalahan *issue* dan analisis sasaran perbaikan berdasarkan layanan yang dijalankan. Lebih jauh, setelah dilakukan analisis kesenjangan, selanjutnya dianalisis inisiatif program layanan berdasarkan dari setiap layanan disusun berdasarkan “Permasalahan *Issue* Aplikasi” dan “Sasaran perbaikan yang diharapkan”.

Penyusunan analisis kesenjangan layanan dilakukan berdasarkan hasil asesmen terhadap kebutuhan dukungan sistem informasi untuk setiap layanan. *Assessment* dilakukan berdasarkan layanan dari setiap unit kerja. Adapun hasil analisis gap dan inisiatif program atau rekomendasi layanan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut.

Tabel 1.3.1. Analisis GAP dan Rekomendasi Layanan SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya

No	Kondisi saat ini	Kondisi Target	Analisis GAP	Rekomendasi
1	Proses pelayanan beberapa masih manual, membutuhkan waktu lama dan sering menimbulkan keluhan dari masyarakat.	Sistem pelayanan publik berbasis digital yang cepat, transparan, dan responsif.	Layanan manual menyebabkan keterlambatan dan kurang transparan, berdampak pada ketidakpuasan publik.	Implementasi sistem e-government untuk mempercepat proses layanan, serta pelatihan untuk pegawai dalam menggunakan sistem digital tersebut.
2	Layanan publik masih terbatas dan belum sepenuhnya terintegrasi. Selain itu, terdapat beberapa layanan publik non prioritas yang belum terdigitalisasi secara <i>online</i> .	Layanan publik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya perlu terdigitalisasi dan terintegrasi secara menyeluruh	Perlu keterpaduan dalam digitalisasi di seluruh aspek layanan publik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya	Pengembangan Portal Layanan Publik Terintegrasi
3	Layanan internal masih terbatas dan belum sepenuhnya terintegrasi. Selain itu, terdapat beberapa layanan internal non prioritas yang belum terdigitalisasi secara <i>online</i> .	Layanan internal Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya perlu terdigitalisasi dan terintegrasi secara menyeluruh	Perlu keterpaduan dalam digitalisasi di seluruh aspek layanan internal Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya	Pengembangan Portal Layanan Internal

Hasil analisis gap layanan SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya diharapkan dapat menggambarkan kondisi *eksisting* Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya saat ini sehingga inisiatif program atau rekomendasi dapat tepat sasaran atau sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Merujuk pada Tabel 1.3.1., menunjukkan bahwa

belum maksimalnya Kualitas Layanan, Infrastruktur Teknologi dan Keterpaduan Layanan Antar Perangkat Daerah

Secara umum, kesimpulan dari tabel analisis di atas adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya perlu melakukan peningkatan signifikan dalam pengelolaan layanan berbasis elektronik (SPBE). Guna mencapai kondisi target, diperlukan beberapa langkah strategis yang bertujuan untuk menghilangkan redundansi, meningkatkan efisiensi, dan memastikan semua layanan berbasis elektronik dapat diakses dengan mudah dan cepat, sehingga mampu meningkatkan kepuasan pengguna serta efektivitas operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

1.4. Analisis Kesenjangan & Inisiatif Program Aplikasi SPBE

Analisis kesenjangan dan inisiatif program aplikasi merupakan langkah penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi aplikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Analisis kesenjangan berisikan asesmen berdasarkan permasalahan kondisi saat ini, kondisi target, analisis gap, serta rekomendasi perbaikan berdasarkan aplikasi yang digunakan. Adapun hasil analisis kesenjangan aplikasi SPBE sebagai berikut.

Analisis Kesenjangan Aplikasi SPBE disusun berdasarkan hasil analisis kesenjangan layanan yang dikelompokkan berdasarkan aplikasi. Adapun secara rinci, analisis gap dan rekomendasi aplikasi SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut.

Tabel 1.4.1. Analisis GAP dan Rekomendasi Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya

No	Kondisi saat ini	Kondisi Target	Analisis GAP	Rekomendasi
1	Belum ada sistem penghubung (API Gateway) yang mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah secara efektif.	Perlunya API Gateway yang memungkinkan integrasi dan interoperabilitas antar layanan pemerintah dengan mudah dan aman.	Perlunya infrastruktur teknologi yang mendukung integrasi sistem antar lembaga, dan perlunya standar API yang diterapkan.	Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (API gateway)
2	Perlunya autentikasi berkala di setiap aplikasi layanan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengguna	Implementasi Single Sign On (SSO) untuk akses ke semua aplikasi layanan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan satu kali autentikasi.	Perlunya integrasi sistem autentikasi antara aplikasi-aplikasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.	Single Sign On (SSO)
4	Terdapat banyak aplikasi dengan fitur yang tumpang tindih, menyebabkan redundansi dan membingungkan pengguna.	Aplikasi yang memiliki fitur serupa atau tumpang tindih digabungkan menjadi satu aplikasi dengan fungsi yang lebih lengkap.	Redundansi aplikasi yang mengakibatkan pemborosan sumber daya dan membingungkan pengguna dalam memilih aplikasi yang sesuai.	Merger Aplikasi / Takedown Aplikasi Sejenis
5	Aplikasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya belum terintegrasi sehingga menyebabkan duplikasi data dan proses yang tidak efisien.	Aplikasi-aplikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya terintegrasi secara penuh, memungkinkan pertukaran data dan proses yang seamless.	Keterpisahan aplikasi yang mengakibatkan tidak efisiennya pengelolaan data dan duplikasi informasi antar aplikasi.	Integrasi Aplikasi

No	Kondisi saat ini	Kondisi Target	Analisis GAP	Rekomendasi
6	Pengembangan aplikasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya bersifat reaktif dan tidak terencana, seringkali hanya memenuhi kebutuhan jangka pendek tanpa pertimbangan jangka panjang.	Perlunya pengembangan perangkat lunak yang mendukung tujuan dan sasaran organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan mengacu pada kebutuhan pendukung pengaplikasiannya. Rencana pengembangan aplikasi yang direncanakan pada arsitektur aplikasi berlandaskan pada 6 kelompok aplikasi yang diintegrasikan dengan pendekatan arsitektur pengembangan aplikasi berbasis <i>microservices</i> .	Perlunya perencanaan strategis dalam pengembangan aplikasi	Pengembangan aplikasi

Hasil analisis gap aplikasi SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya diharapkan dapat menggambarkan kondisi *eksisting* Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya saat ini sehingga inisiatif program atau rekomendasi dapat tepat sasaran atau sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Merujuk pada Tabel 1.4.1., menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya belum memiliki sistem penghubung (*API Gateway*), belum memiliki SSO dimana serta banyak aplikasi dengan fitur yang tumpang tindih dan belum terintegrasi. Oleh karena itu, kesimpulan dari tabel analisis di atas adalah bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya perlu melakukan berbagai pengembangan dan peningkatan dalam sistem teknologi dan aplikasi untuk meningkatkan efisiensi, konsistensi, dan integrasi layanan. Langkah-langkah ini meliputi pengembangan *API Gateway* untuk interoperabilitas antar layanan, implementasi *Single Sign-On* (SSO) untuk memudahkan akses pengguna, merger atau takedown aplikasi dan integrasi aplikasi untuk mengurangi redudansi, pengembangan aplikasi yang lebih strategis, dan pemeliharaan aplikasi yang proaktif. Dengan mengimplementasikan rekomendasi ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dapat memberikan layanan yang lebih seamless, responsif, dan aman kepada masyarakat.

1.5. Analisis Kesenjangan & Inisiatif Program Infrastruktur SPBE

Proses pemetaan kebutuhan infrastruktur dilakukan dengan mengukur dan mengkategorikan kesenjangan kualitas yang mengacu pada ketersediaan infrastruktur saat ini sesuai metadata infrastruktur yang dapat digunakan sebagai landasan peningkatan kualitas infrastruktur. Analisis gap ini menjadi acuan untuk perbaikan yang perlu dilakukan oleh Kementerian PANRB. Pada proses ini dilakukan langkah perbandingan antara infrastruktur saat ini dan infrastruktur ke depan sesuai arsitektur target. Gambaran kondisi infrastruktur saat ini memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa besar perbedaan dan perbaikan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya sehingga diharapkan menjadi acuan untuk persiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam merencanakan kebutuhan infrastruktur pada arsitektur target yang telah ditetapkan. Adapun secara rinci, analisis gap dan rekomendasi infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut.

Tabel 1.5.1. Analisis GAP dan Rekomendasi Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya

No	Kondisi saat ini	Kondisi Target	Analisis GAP	Rekomendasi
1	Pusat Data - Lokasi Pusat Data - Lokasi Pusat Data berada di lokasi aman dari bencana - Lokasi Pusat Data berada di lokasi aman dari dampak huru hara - Lokasi Pusat Data berada di area aman dari jalur transportasi -Area Fungsi Gedung Pusat Data - Terdapat Ruang Data Center (Computer room) - Belum memiliki Ruang untuk Access Provider - Belum Terdapat Ruang Operasi Personel TI - Belum Terdapat Staging area (Tempat konfigurasi perangkat untuk System Administrator dan Network Engineer sebelum perangkat beroperasi) - Belum memiliki Ruang Elektrikal/UPS - Sudah memiliki Ruang Generator - Sudah memiliki Ruang Administrasi Kunjungan - Terdapat Ruang Gudang untuk menempatkan datangnya perangkat baru - Terdapat Ruang Gudang untuk menempatkan perangkat yang tidak berfungsi dan tidak terpakai - Terdapat Area Bongkar Muat -Sistem Pemadam Kebakaran - Belum Tersedia pintu darurat di area pusat data yang dapat dibuka keluar - Belum Tersedia lampu darurat sebagai penanda keluar darurat ketika terjadi bencana seperti kebakaran. - Bahan bangunan di ruang pusat data tidak mudah terbakar api - Penerapan sistem deteksi asap bangunan belum diintegrasikan ke satu alarm Bersama. - Di area pusat data belum tersedia sistem pemadam kebakaran otomatis dan	Pusat Data -Lokasi Pusat Data - Lokasi Pusat Data berada di lokasi aman dari bencana - Lokasi Pusat Data berada di lokasi aman dari dampak huru hara - Lokasi Pusat Data berada di area aman dari jalur transportasi -Area Fungsi Gedung Pusat Data - Terdapat Ruang Data Center (Computer room) - Terdapat Ruang untuk Access Provider - Terdapat Ruang Operasi Personel TI - Terdapat Staging area (Tempat konfigurasi perangkat untuk System Administrator dan Network Engineer sebelum perangkat beroperasi) - Terdapat Ruang Elektrikal/UPS - Terdapat Ruang Generator - Terdapat Ruang Administrasi Kunjungan - Terdapat Ruang Gudang untuk menempatkan datangnya perangkat baru - Terdapat Ruang Gudang untuk menempatkan perangkat yang tidak berfungsi dan tidak terpakai - Terdapat Area Bongkar Muat -Sistem Pemadam Kebakaran - Tersedia pintu darurat di area pusat data yang dapat dibuka keluar - Tersedia lampu darurat sebagai penanda keluar darurat ketika terjadi bencana seperti kebakaran. - Bahan bangunan di ruang pusat data tidak mudah terbakar api - Penerapan sistem deteksi asap bangunan yang diintegrasikan ke satu alarm Bersama. - Di area pusat tersedia sistem pemadam kebakaran otomatis dan dapat juga diaktifkan secara manual. - Pemeliharaan rutin dan tercatat pada alat-alat pengendali kebakaran. - Pelatihan pengendalian api terjadwal kepada personel TI	Ketersediaan, dan keandalan fasilitas pendukung Pusat Operasi Data yang belum optimal dan juga belum memenuhi dari indikator untuk Standar SNI mengenai Pusat data	Penyediaan dan pemeliharaan mengenai aset TIK Pusat Data dan juga fasilitas pendukung seperti Sistem Pemadam Kebakaran, Penyediaan Catu Daya, Sistem Pendingin Udara, dan juga Sistem Monitoring di Pusat Data

No	Kondisi saat ini	Kondisi Target	Analisis GAP	Rekomendasi
	dapat juga diaktifkan secara manual - Belum Dilakukan pemeliharaan rutin dan tercatat pada alat-alat pengendali kebakaran. - Pelatihan pengendalian api belum terjadwal kepada personel TI - Bangunan pusat data sudah dilengkapi dengan sistem proteksi petir untuk menanggulangi kebakaran -Catu Daya - Personil Pusat Komputasi belum melakukan Pengukuran daya listrik utama yang paling sedikit 20% lebih besar dari proyeksi beban puncak pusat data - Sumber listrik belum diantisipasi dari dua sumber yang berbeda, Misal dari dua trafo yang berbeda. - Pengelola Listrik belum menyediakan catu daya listrik alternatif berupa generator. - Generator dapat menyala otomatis saat listrik PLN mati sehingga mengakibatkan sumber daya TIK mati - UPS mampu memasok daya ke Data Center ketika listrik PLN mati - Pergantian listrik PLN ke Genset belum otomatis - Komputer kerja personil pusat data belum disediakan alternatif catu daya -Sistem Pendingin - Telah tersedia alat pengkondisi suhu dan kelembaban udara. - Telah terdapat alat pemantau suhu dan kelembaban ruang pusat data. - Suhu dingin ruang pusat data telah terkontrol antara 18°C-24°C. Suhu ruang pusat data cenderung sejuk. - Kelembaban udara di ruang pusat data terkontrol antara 40%-60% RH (Relative Humidity). - Sistem pendingin udara (AC) pusat data sudah dihubungkan dengan daya utama (listrik PLN) satu sumber dengan pusat data..	- Bangunan pusat data dilengkapi dengan sistem proteksi petir untuk menanggulangi kebakaran -Catu Daya - Pengukuran daya listrik utama yang paling sedikit 20% lebih besar dari proyeksi beban puncak pusat data - Sumber listrik diantisipasi dari dua sumber yang berbeda, Misal dari dua trafo yang berbeda. - Pengelola Listrik menyediakan catu daya listrik alternatif berupa generator. - Generator dapat menyala otomatis oleh sensor ketika terjadi listrik PLN mati, kurang dari 10 detik. - UPS mampu memasok daya ke Data Center ketika listrik PLN mati - Pergantian sumber listrik dari PLN ke Genset atau sebaliknya menggunakan sistem ATS (Automatic Transfer switch) dan didukung Sistem AMF (Automatic Main Failure) untuk menyalakan mesin genset. - Komputer kerja personil pusat data disediakan alternatif catu daya -Sistem Pendingin - Terdapat alat pengkondisi suhu dan kelembaban udara - Terdapat alat pemantau suhu dan kelembaban ruang pusat data - Suhu dingin di ruang pusat data terkontrol antara 18°C-24°C - Kelembaban udara di ruang pusat data terkontrol antara 40%-60% RH (Relative Humidity). - Sistem pendingin udara (AC) pusat data dihubungkan dengan daya utama (listrik PLN) satu sumber dengan pusat data. - Sistem pendingin udara pusat data dihubungkan ke catu daya alternative (seperti generator). - Sistem Pendingin menggunakan AC presisi atau HVAC (Heating, ventilation, and air conditioning) -Manajemen Kabel - Kabel daya (Kabel listrik) dan kabel data tembaga (UTP/STP) diberi jarak antara 30-60cm - Kabel yang berada di rack cabinet diatur dengan rapi		

No	Kondisi saat ini	Kondisi Target	Analisis GAP	Rekomendasi
	- Sistem pendingin udara pusat data sudah dihubungkan ke catu daya alternative (seperti generator). - Sistem Pendingin belum menggunakan AC presisi. -Manajemen Kabel - Kabel daya (Kabel listrik) dan kabel data tembaga (UTP/STP) telah diberi jarak antara 30-60cm. - Kabel yang berada di rack cabinet telah diatur dengan rapi. - Kabel data (kabel jaringan) yang melewati dinding sudah menggunakan pelindung kabel (cable duct). - Kabel-kabel di pusat data sudah diberikan jalur (cable pathways) menggunakan cable tray. - Kabel jaringan di pusat data telah diberikan label identifikasi (Terkoneksi ke). - Kabel yang berada di rack cabinet sudah diatur dengan rapi. - Telah terdapat raised floor atau lantai yang ditinggikan. -Sistem Monitoring - Belum tersedia Sistem Monitoring Server. - Belum tersedia Sistem Monitoring Jaringan. - Belum tersedia Sistem Monitoring Keamanan Server (Security Information and Event Management). - Belum tersedia Sistem Monitoring Keamanan jaringan (Security Information and Event Management). - Belum tersedia Sistem Monitoring Keamanan aplikasi (Security Information and Event Management). - Belum tersedia Sistem Monitoring dan Alert kondisi Udara (suhu dan kelembaban) di Pusat Data. - Belum tersedia Sistem Monitoring pada UPS dan Genset untuk Pusat Data. - Belum tersedia Sistem Monitoring pada BBM genset untuk Pusat Data.	- Kabel data (kabel jaringan) yang melewati dinding sebagian besar sudah menggunakan pelindung kabel (cable duct). - Kabel-kabel di pusat data diberikan jalur (cable pathways) menggunakan cable tray. - Kabel jaringan di pusat data telah diberikan label identifikasi (Terkoneksi ke) - Setiap Rak perangkat diberikan label informasi terdiri dari nomor rak dan nomor baris pada rak - Terdapat raised floor atau lantai yang ditinggikan -Sistem Monitoring - Tersedia Sistem Monitoring status (hidup, mati) dan ketersediaan sumber daya (RAM, CPU, HDD) Server - Tersedia Sistem Monitoring status (hidup, mati) dan ketersediaan sumber daya (RAM, CPU, HDD) jaringan - Tersedia Sistem Monitoring Keamanan Server (Security Information and Event Management) - Tersedia Sistem Monitoring Keamanan Jaringan (Security Information Event Management) - Tersedia Sistem Monitoring Keamanan Aplikasi (Security Information Event Management) - Tersedia Sistem Monitoring dan Alert kondisi Udara di Pusat Data - Tersedia Sistem Monitoring pada UPS dan Genset untuk Pusat Data - Tersedia Sistem Monitoring pada BBM genset untuk Pusat Data		

No	Kondisi saat ini	Kondisi Target	Analisis GAP	Rekomendasi
2	Infrastruktur server dan <i>storage</i> aplikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya belum berada di Pusat Data Nasional (PDN).	Kapasitas server dan <i>storage</i> aplikasi yang selalu tersedia, dan handal.	Keterbatasan kapasitas <i>server</i> dan <i>storage</i> yang dapat menyebabkan penurunan kinerja sistem.	Program Kerja Penyusunan Rencana Kapasitas Infrastruktur <i>server</i> dan <i>storage</i> aplikasi.
3	Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya belum mempunyai fasilitas DRC (Disaster Recovery Center) yang difungsikan untuk melakukan backup terhadap pusat data	Menyediakan DRC (Disaster Recovery Center) untuk melakukan pencadangan terhadap pusat data , bisa dengan menggunakan integrasi ke PDN dan juga menyusun DRP (Disaster Recovery Plan)	Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya belum mempunyai DRC (Disaster Recovery Center) dan juga melakukan penyusunan terkait DRP (Disaster Recovery Plan)	Menyediakan DRC (Disaster Recovery Center) untuk melakukan pencadangan terhadap pusat data , bisa dengan menggunakan integrasi ke PDN dan juga menyusun DRP (Disaster Recovery Plan)
4	Topologi infrastruktur jaringan intra Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya sudah menerapkan <i>three-tier</i> (hirarki), tapi belum menyediakan perangkat redundant untuk perangkat kritikal.	Infrastruktur perangkat jaringan dan keamanan jaringan selalu tersedia, dan handal. dan tersedia link failover untuk mencegah downtime	Ketersediaan, dan keandalan infrastruktur perangkat jaringan dan keamanan jaringan yang harus selalu dijaga.	Program Kerja Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan.
5	Jumlah perangkat dan lalu lintas data di internal jaringan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya meningkat seiring peningkatan jumlah pegawai dan data yang dikelola. Namun	Kapasitas infrastruktur perangkat jaringan dan keamanan jaringan yang selalu tersedia, dan handal.	Keterbatasan kapasitas infrastruktur perangkat jaringan dan keamanan jaringan yang dapat menyebabkan penurunan layanan jaringan intra.	Program Kerja Peningkatan Kapasitas dan Keandalan Infrastruktur Jaringan.

Hasil analisis gap infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya diharapkan dapat menggambarkan kondisi *eksisting* Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya saat ini sehingga inisiatif program atau rekomendasi dapat tepat sasaran atau sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

1.6. Analisis Kesenjangan & Inisiatif Program Keamanan Informasi SPBE

Analisis kesenjangan dan inisiatif program keamanan informasi merupakan langkah penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi keamanan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Analisis kesenjangan berisikan asesmen berdasarkan permasalahan *issue* dan analisis sasaran perbaikan berdasarkan kondisi keamanan informasi saat ini. Lebih jauh, setelah dilakukan analisis kesenjangan, selanjutnya dianalisis inisiatif program keamanan informasi berdasarkan dari hasil *assessment* aplikasi.

Tabel 1.6.1. Analisis GAP dan Rekomendasi Keamanan Informasi SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya

No	Kondisi saat ini	Kondisi Target	Analisis GAP	Rekomendasi
1	Standar keamanan serta peraturan terkait standar teknis dan prosedur keamanan belum cukup lengkap	Penyesuaian dan penambahan standar keamanan serta peraturan terkait standar teknis dan prosedur keamanan sesuai Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021.	Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya belum memiliki standar dan prosedur keamanan sesuai Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021.	• Program Kerja Penyusunan SOP Keamanan Aplikasi SPBE • Program Kerja Penyusunan SOP Keamanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah • Program Kerja Penyusunan SOP Keamanan Jaringan Intra Pemerintah (JIP)
2	Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya sudah memiliki sertifikasi atau penilaian eksternal seperti Standar Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) ISO 27001.	Adanya pembaharuan sertifikasi atau penilaian kelaikan seperti Standar Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) ISO 27001 atau audit indeks KAMI	Sudah dilaksanakan Sertifikasi dan Penilaian Kelaikan dari lembaga Eksternal, tapi perlu dilaksanakan pembaruan seperti melakukan sertifikasi ISO 27001:2023	Perencanaan mengenai audit eksternal atau sertifikasi dari lembaga eksternal
3	Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya memiliki banyak aplikasi diakses melalui internet.	Aplikasi handal dan aman serta terlindungi dari serangan siber.	Keandalan dan keamanan aplikasi selalu terjaga.	Program Kerja Penilaian Kerentanan dan Pengujian Penetrasi Aplikasi.
4	Peningkatan serangan siber melalui perantara kesalahan manusia (<i>human error</i>).	Pengetahuan, pemahaman dan kepedulian terhadap keamanan informasi oleh semua pemangku kepentingan (stakeholders).	Pengetahuan, pemahaman dan kepedulian terhadap keamanan informasi harus selalu dijaga dan ditingkatkan	Program Kerja Edukasi dan Sosialisasi Keamanan Informasi.

Hasil analisis gap keamanan informasi SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya diharapkan dapat menggambarkan kondisi *eksisting* Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya saat ini sehingga inisiatif program atau rekomendasi dapat tepat sasaran atau sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Bab II Portofolio Inisiatif Indeks SPBE

2.1. Tata Kelola

2.1.1. Kebijakan Arsitektur SPBE (PR-T-001)

Tabel 2.1.1.1. Program Kerja Kebijakan Arsitektur SPBE

Deskripsi	:	Kebijakan Arsitektur SPBE untuk mengatur implementasi Arsitektur SPBE yang memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Layanan SPBE, Aplikasi SPBE, Infrastruktur SPBE, Keamanan SPBE). Kebijakan ini perlu disusun dengan mengacu pada Perpres Nomor 132 Tahun 2022.
Detail	:	1. Reviu dan Tindak Lanjut Kebijakan Arsitektur SPBE sesuai dengan peraturan pusat/hasil assesment SPBE yang terbaru
Indikator Pencapaian	:	1. Tersedianya kebijakan implementasi SPBE yang mencakup indikator kebijakan Arsitektur SPBE. 2. Kebijakan Arsitektur SPBE di- <i>evaluasi</i> secara berkala minimal 1 tahun sekali. 3. Melakukan pembaharuan kebijakan Arsitektur SPBE Ketika ada perubahan aturan dari internal maupun pusat.
Pelaksana	:	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Bagian Hukum
Tahun Pelaksanaan		2024-2028
Keterangan	:	Kebijakan Arsitektur SPBE disusun dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 1.

2.1.2. Kebijakan Peta Rencana SPBE (PR-T-002)

Tabel 2.1.2.1. Program Kerja Kebijakan Peta Rencana SPBE

Deskripsi	:	Kebijakan Peta Rencana SPBE untuk mengatur implementasi Peta Rencana SPBE yang mengatur seluruh muatan Peta Rencana SPBE secara lengkap (Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit TIK), Kebijakan ini perlu disusun dengan mengacu pada Perpres Nomor 132 Tahun 2022.
Detail	:	1. Reviu dan Tindak Lanjut Kebijakan Peta Rencana SPBE sesuai dengan peraturan pusat/hasil assesment SPBE yang terbaru
Indikator Pencapaian	:	1. Tersedianya kebijakan implementasi SPBE yang mencakup indikator kebijakan Peta Rencana SPBE. 2. Kebijakan Peta Rencana SPBE di- <i>evaluasi</i> secara berkala minimal 1 tahun sekali. 3. Melakukan pembaharuan kebijakan Peta Rencana SPBE Ketika ada perubahan aturan dari internal maupun pusat.

Pelaksana	:	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Bagian Hukum
Tahun Pelaksanaan	:	2024-2028
Keterangan	:	Kebijakan Peta Rencana SPBE disusun dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 2.

2.1.3. Kebijakan Manajemen Data (PR-T-003)

Tabel 2.1.3.1. Program Kerja Kebijakan Manajemen Data

Deskripsi	:	Kebijakan Manajemen Data untuk mengatur implementasi Manajemen Data yang telah mengatur seluruh rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data. Kebijakan ini perlu disusun dengan mengacu pada Perpres Nomor 39 Tahun 2019 dan Permen PPN/Bappenas Nomor 16 Tahun 2020
Detail	:	1. Reviu dan Tindak Lanjut Kebijakan Manajemen Data sesuai dengan peraturan pusat/hasil assesment SPBE yang terbaru
Indikator Pencapaian	:	1. Tersedianya kebijakan implementasi SPBE yang mencakup indikator kebijakan Manajemen Data. 2. Kebijakan Manajemen Data dievaluasi secara berkala minimal 1 tahun sekali. 3. Melakukan pembaharuan kebijakan Manajemen Data Ketika ada perubahan aturan dari internal maupun pusat.
Pelaksana	:	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Bagian Hukum
Tahun Pelaksanaan	:	2024-2028
Keterangan	:	Kebijakan Manajemen Data SPBE disusun dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 3.

2.1.4. Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE (PR-T-004)

Tabel 2.1.4.1. Program Kerja Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE

Deskripsi	:	Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE untuk mengatur proses konsultasi terkait siklus Pembangunan dan mengatur standarisasi pengembangan Aplikasi SPBE dengan unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK.
Detail	:	1. Reviu dan Tindak Lanjut Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE

Indikator Pencapaian	: 1. Tersedianya kebijakan implementasi SPBE yang mencakup indikator kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE. 2. Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE dievaluasi secara berkala minimal 1 tahun sekali. 3. Melakukan pembaharuan kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE Ketika ada perubahan aturan dari internal maupun pusat.
Pelaksana	: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Bagian Hukum
Tahun Pelaksanaan	2024-2028
Keterangan	: Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE disusun dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 4.

2.1.5. Kebijakan Pusat Data (PR-T-005)

Tabel 2.1.5.1. Program Kerja Kebijakan Pusat Data

Deskripsi	: Kebijakan Pusat Data untuk mengatur Layanan Pusat Data untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pemerintah Daerah.
Detail	: 1. Reviu dan Tindak Lanjut Pengelolaan Pusat Data
Indikator Pencapaian	: 1. Tersedianya kebijakan implementasi SPBE yang mencakup indikator kebijakan Pusat Data. 2. Kebijakan Pusat Data dievaluasi secara berkala minimal 1 tahun sekali. 3. Melakukan pembaharuan kebijakan Pusat Data Ketika ada perubahan aturan dari internal maupun pusat.
Pelaksana	: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Bagian Hukum
Tahun Pelaksanaan	2024-2028
Keterangan	: Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE disusun dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 5.

2.1.6. Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah (PR-T-006)

Tabel 2.1.6.1. Program Kerja Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Deskripsi	: Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah untuk mengatur Layanan Jaringan Intra untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pemerintah Daerah.
Detail	: 1. Reviu dan Tindak Lanjut Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah

Indikator Pencapaian	: 1. Tersedianya Kebijakan implementasi SPBE yang mencakup indikator kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah. 2. Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah di- <i>evaluasi</i> secara berkala minimal 1 tahun sekali. 3. Melakukan pembaharuan kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Ketika ada perubahan aturan dari internal maupun pusat.
Pelaksana	: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Bagian Hukum
Tahun Pelaksanaan	2024-2028
Keterangan	: Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah disusun dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 6.

2.1.7. Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat (PR-T-007)

Tabel 2.1.7.1. Program Kerja Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat

Deskripsi	: Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat untuk mengatur penggunaan Sistem Penghubung Layanan untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pemerintah Daerah.
Detail	: 1. Reviu dan Tindak Lanjut Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat
Indikator Pencapaian	: 1. Tersedianya kebijakan implementasi SPBE yang mencakup indikator kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat 2. Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat di- <i>evaluasi</i> secara berkala minimal 1 tahun sekali 3. Melakukan pembaharuan kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat ketika ada perubahan aturan dari internal maupun pusat
Pelaksana	: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Bagian Hukum
Tahun Pelaksanaan	2024-2028
Keterangan	: Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat disusun dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 7.

2.1.8. Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi (PR-T-008)

Tabel 2.1.8.1. Program Kerja Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi

Deskripsi	: Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi untuk mengatur seluruh cakupan Manajemen Keamanan Informasi secara lengkap (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi). Kebijakan ini perlu disusun dengan mengacu pada Perban BSSN Nomor 04 Tahun 2021.
Detail	: 1. Reviu dan Tindak Lanjut Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi
Indikator Pencapaian	: 1. Tersedianya kebijakan implementasi SPBE yang mencakup indikator kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi. 2. Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi di- <i>evaluasi</i> secara berkala minimal 1 tahun sekali. 3. Melakukan pembaharuan kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi ketika ada perubahan aturan dari internal maupun pusat.
Pelaksana	: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Bagian Hukum
Tahun Pelaksanaan	2024-2028
Keterangan	: Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi disusun dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 8.

2.1.9. Kebijakan Internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (PR-T-009)

Tabel 2.1.9.1. Program Kerja Kebijakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

Deskripsi	: Program Kebijakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mengatur pelaksanaan seluruh Audit TIK (Audit Infrastruktur SPBE Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE).
Detail	: 1. Reviu dan Tindak Lanjut Kebijakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi
Indikator Pencapaian	: 1. Tersedianya Kebijakan implementasi SPBE yang mencakup indikator kebijakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi. 2. Kebijakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi di- <i>evaluasi</i> secara berkala minimal 1 tahun sekali. 3. Melakukan pembaharuan kebijakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Ketika ada perubahan aturan dari internal maupun pusat.
Pelaksana	: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Bagian Hukum

Tahun Pelaksanaan	2024-2028
Keterangan	: Kebijakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi disusun dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 9.

2.1.10. Kebijakan Tim Koordinasi (PR-T-010)

Tabel 2.1.10.1. Program Kerja Kebijakan Tim koordinasi SPBE

Deskripsi	: Kebijakan Tim Koordinasi SPBE untuk mengatur implementasi Tim Koordinasi SPBE yang mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah yang mendukung penerapan SPBE pada seluruh unit kerja/perangkat daerah di Pemerintah Daerah. Kebijakan ini perlu disusun dengan mengacu pada KepmenpanRB Nomor 962 Tahun 2021
Detail	: 1. Reviu dan Tindak Lanjut Kebijakan Tim Koordinasi SPBE.
Indikator Pencapaian	: 1. Tersedianya kebijakan implementasi SPBE yang mencakup indikator kebijakan Tim Koordinasi SPBE. 2. Melakukan pembaharuan kebijakan Tim Koordinasi SPBE Ketika ada perubahan aturan dari internal maupun pusat.
Pelaksana	: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Bagian Hukum
Tahun Pelaksanaan	2024-2028
Keterangan	: Kebijakan Tim Koordinasi SPBE disusun dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 10.

2.1.11. Pembentukan Komite/Forum SPBE (PR-T-011)

Tabel 2.1.11.1. Program Kerja Pembentukan Komite/Forum SPBE

Deskripsi	: Membentuk Komite/Forum manajemen SPBE, sejauh ini sesuai arahan dari Kemenpan-RB perlu membentuk Tim Koordinasi SPBE, Komite/Forum Manajemen Data, Komite/Forum Manajemen Risiko dari ketiga hal tersebut yang belum dibentuk yakni Komite/Forum Manajemen Risiko
Detail	: Membentuk Komite/Forum Manajemen SPBE yang mengacu pada pedoman nasional tentang manajemen SPBE
Indikator Pencapaian	: 1. Penyusunan dan Evaluasi Pergub / SK Tim Koordinasi SPBE 2. Penyusunan dan Evaluasi Pergub / SK Komite Forum Satu Data

	3. Penyusunan dan Evaluasi Pergub / SK Komite Manajemen Risiko 4. Penyusunan dan Evaluasi Pergub / SK Komite Manajemen Perubahan 5. Penyusunan dan Evaluasi Pergub / SK Komite Manajemen Pengetahuan 6. Penyusunan dan Evaluasi Pergub / SK Pokja Manajemen Layanan 7. Penyusunan dan Evaluasi Pergub / SK Pokja Manajemen Keamanan Informasi
Pelaksana	: Tim Koordinasi SPBE
Tahun Pelaksanaan	2024
Keterangan	: Secara rutin perlu mengikuti bimtek dan sosialisasi dari Kemenpan-RB guna memastikan Tata Kelola SPBE selalu mengikuti perkembangan arahan dari Instansi Pusat terkait.

2.1.12. Kolaborasi Penerapan SPBE (PR-T-012)

Tabel 2.1.12.1. Program Kerja Kolaborasi Penerapan SPBE

Deskripsi	: Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat berarti kerjasama antara pemerintah dan berbagai pihak lainnya untuk menerapkan sistem ini secara efektif dan efisien.
Detail	: 1. Pelaksanaan kolaborasi penerapan RB tematik digitalisasi / SPBE 2. Evaluasi pelaksanaan penerapan RB tematik digitalisasi / Indeks SPBE Internal
Indikator Pencapaian	: Meningkatnya efektivitas dan efisiensi layanan publik, mempercepat akses masyarakat terhadap layanan publik, dan meminimalkan kesalahan dalam pengelolaan data pemerintah. penerapan SPBE juga dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
Pelaksana	: Tim Koordinasi SPBE
Tahun Pelaksanaan	2024-2028
Keterangan	: Kolaborasi bisa dilakukan melalui kerjasama dengan Instansi Pemerintah lain, Perguruan Tinggi, Swasta dan Masyarakat. Kolaborasi SPBE dilakukan dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 20.

2.1.13. Evaluasi dan Revisi Tata Kelola SPBE (PR-T-013)

Tabel 2.1.13.1. Program Kerja Evaluasi dan Revisi Tata Kelola SPBE

Deskripsi	:	Evaluasi dan Revisi Tata Kelola SPBE secara berkala mengikuti pedoman SPBE dari Instansi Pusat terkait.
Detail	:	Adapun evaluasi dan revisi tata Kelola SPBE dilakukan terhadap: - Evaluasi dan Revisi Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Adanya Evaluasi dan Revisi Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Setiap Tahunnya sesuai dengan kebijakan pusat. - Monitoring dan Evaluasi Rencana Anggaran TIK Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Anggaran TIK pada setiap perangkat daerah - Evaluasi dan Revisi Prose Bisnis Pemerintah Daerah Evaluasi Proses Bisnis yang sesuai dengan tupoksi utama pada perangkat daerah - Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Aplikasi Pemerintah Daerah Mempunyai Standar Pengembangan Aplikasi Agar bisa di dikelola dengan mudah oleh pemerintah daerah - Monitoring dan Evaluasi Tim Koordinasi SPBE Adapun usulan jadwal program kerja Tim Koordinasi Pemerintah selama setahun dijelaskan pada lampiran 1.
Indikator Pencapaian	:	Adanya Evaluasi Terkait Tata Kelola SPBE
Pelaksana	:	Tim Koordinasi SPBE
Tahun Pelaksanaan	:	2024-2028
Keterangan	:	Secara rutin perlu mengikuti bimtek dan sosialisasi dari Kemenpan-RB guna memastikan Tata Kelola SPBE selalu mengikuti perkembangan arahan dari Instansi Pusat terkait.

2.2. Manajemen SPBE

2.2.1. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Risiko (PR-M-001)

Tabel 2.2.1.1. Program Kerja Penyusunan dan Penerapan Manajemen Risiko

Deskripsi	:	Manajemen risiko sistem pemerintahan berbasis elektronik adalah proses identifikasi, penilaian, pengendalian, dan pemantauan risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada instansi pemerintah, Pedoman yang dapat mengacu pada Permenpan-RB 05/2020.
Spesifikasi	:	- Pembentukan komite manajemen risiko - Penyusunan dan penetapan kebijakan manajemen risiko SPBE

	3. Penyusunan pedoman manajemen risiko SPBE yang berisi kerangka manajemen risiko SPBE, proses manajemen risiko SPBE, struktur manajemen risiko SPBE, budaya risiko SPBE 4. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan pelaksanaan manajemen risiko 5. Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi risiko SPBE oleh inspektorat 6. Penetapan konteks risiko SPBE 7. Penyusunan identifikasi risiko SPBE dengan menguraikan jenis risiko SPBE, penyebab, kategori, dampak, dan area dampak 8. Penyusunan analisis risiko SPBE dengan menguraikan kemungkinan dan dampak yang ditimbulkan seta level risiko SPBE & penyusunan evaluasi risiko SPBE 9. Penyusunan rencana penanganan risiko SPBE dengan menguraikan opsi, rencana aksi penanganan risiko, output, jadwal implementasi, dan penanggung jawabnya 10. Penyusunan laporan evaluasi manajemen risiko SPBE secara periodik dan insidental
Indikator Pencapaian	1. SK Komite Manajemen Risiko SPBE. 2. SOP Manajemen Risiko SPBE. 3. Penerapan Manajemen Risiko SPBE. 4. Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko SPBE
Pelaksana	Inspektorat
Tahun Pelaksanaan	2024-2028
Keterangan	Dalam penyusunan Manajemen Risiko SPBE mengikuti arahan kebijakan terkait Manajemen SPBE yang berlaku seperti (Permenpan-RB 05/2020) Manajemen Risiko SPBE diterapkan dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 21.

2.2.2. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi (PR-M-002)

Tabel 2.2.2.1. Program Kerja Penyusunan dan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi

Deskripsi	Manajemen keamanan informasi dalam SPBE bertujuan untuk melindungi informasi pemerintahan yang sensitif dan penting dari serangan siber, kebocoran data, atau penggunaan yang tidak sah. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko keamanan informasi yang mungkin timbul dalam operasi SPBE. Manajemen Keamanan Informasi penetapan ruang lingkup meliputi: Data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE di setiap Perangkat Daerah.
Spesifikasi	1. Membuat postingan keamanan informasi pada media informasi 2. Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi keamanan SPBE

	3. Evaluasi dan perbaikan manajemen keamanan informasi
Indikator Pencapaian	: 1. Penilaian Audit Keamanan SPBE 2. SOP Keamanan Informasi
Pelaksana	: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Tahun Pelaksanaan	2024-2028
Keterangan	: Pada penyusunan Manajemen Keamanan Informasi mengikuti arahan kebijakan terkait manajemen SPBE yang berlaku. Manajemen Keamanan Informasi SPBE diterapkan dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 22.

2.2.3. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Data (PR-M-003)

Tabel 2.2.3.1. Program Kerja Penyusunan dan Penerapan Manajemen Data

Deskripsi	: Manajemen data dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) sangat penting untuk memastikan informasi yang dihasilkan dan digunakan oleh pemerintah memiliki kualitas yang baik, dapat dipercaya, dan dapat digunakan secara efektif dan efisien. Manajemen Data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data.
Spesifikasi	: 1. Pembentukan tim satu data 2. Penyusunan pedoman manajemen data 3. Pembaharuan arsitektur data 4. Pengumpulan data sektoral di masing-masing unit kerja 5. Pemeriksaan pemenuhan data sektoral 6. Penyebarluasan data sektoral 7. Pembaruan data sektoral secara berkala 8. Penyimpanan data pada portal open data 9. Penjaminan kualitas data meliputi daftar data, data prioritas, dan jadwal pemutakhiran data
Indikator Pencapaian	: Penerapan Manajemen Data
Pelaksana	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan
Tahun Pelaksanaan	2024-2028
Keterangan	: Dalam penyusunan Manajemen Data mengikuti arahan kebijakan terkait manajemen SPBE yang berlaku seperti (Permen PPN/ Bappenas 16/2020).

	Manajemen Data SPBE diterapkan dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 23.
--	---

2.2.4. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Aset TIK (PR-M-004)

Tabel 2.2.4. Program Kerja Penyusunan dan Penerapan Manajemen Aset TIK

Deskripsi	: Manajemen aset dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik adalah proses pengelolaan aset teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dimiliki oleh pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan layanan publik secara efektif dan efisien. Aset TIK meliputi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komputer, dan infrastruktur pendukung lainnya yang digunakan untuk mendukung operasi dan layanan publik. Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
Spesifikasi	: 1. Menginventarisasi aset SPBE (aplikasi dan infrastruktur) 2. Penyusunan SOP perencanaan aset TIK 3. Penyusunan SOP pengadaan aset TIK 4. Penyusunan SOP atas penghapusan aset TIK 5. Evaluasi dan perbaikan manajemen aset TIK
Indikator Pencapaian	: 1. Penerapan Manajemen Aset TIK 2. Evaluasi Penerapan Manajemen Aset TIK
Pelaksana	: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun Pelaksanaan	: 2024-2028
Keterangan	: Pada penyusunan Manajemen Aset TIK SPBE mengikuti arahan kebijakan terkait manajemen SPBE yang berlaku. Manajemen Aset TIK diterapkan dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 24.

2.2.5. Penyusunan dan Penerapan Manajemen SDM TIK (PR-M-005)

Tabel 2.2.5.1. Program Kerja Penyusunan dan Penerapan Manajemen SDM

Deskripsi	: Manajemen SDM (Sumber Daya Manusia) dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pemerintahan yang ada. Manajemen SDM TIK dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan SDM dalam SPBE.
Spesifikasi	: 1. Pengadaan SDM TIK (Project Manager, System Analyst, Data Scientist/Engineer, UI/UX Designer, Front-End Web Developer, Front-End Mobile Developer, Back-End Developer, Network Engineer, DevOps, Security Analyst, Application Support)

		2. Analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan TIK																																																
		3. Analisis kebutuhan pelatihan bagi SDM TIK																																																
		4. Pelatihan SDM TIK																																																
		5. Evaluasi pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM TIK																																																
Indikator Pencapaian	:	Penerapan Manajemen SDM TIK																																																
Pelaksana	:	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia																																																
Tahun Pelaksanaan		2024-2028																																																
Keterangan	:	Dalam penyusunan Manajemen SDM TIK mengikuti arahan kebijakan terkait manajemen SPBE yang berlaku. Manajemen SDM TIK diterapkan dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 25. Penyelenggaraan Training SDM SPBE diterapkan dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 25.																																																
<table><tr><th>#</th><th>Domain</th><th>Jenis Pelatihan</th><th>Peran</th><th>Tingkat Jabatan</th><th>Waktu Pelaksanaan</th></tr><tr><td>1</td><td>Tata Kelola & Manajemen SPBE</td><td>Project Management Professional</td><td>Project Manager</td><td>ahli utama / ahli madya</td><td>Menyesuaikan</td></tr><tr><td></td><td></td><td>COBIT 2019</td><td>Project Manager & Enterprise Architect</td><td>ahli utama / ahli madya</td><td>Menyesuaikan</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Manajemen SPBE meliputi : - Manajemen risiko SPBE - Manajemen keamanan informasi SPBE - Manajemen data - Manajemen SDM TIK - Manajemen aset TIK - Manajemen pengetahuan - Manajemen perubahan - Manajemen layanan</td><td>Umum</td><td>ahli utama / ahli madya / ahli muda</td><td>Menyesuaikan</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Peta Proses Bisnis dengan BPMN</td><td>Enterprise Architect & System Analyst</td><td>ahli madya / ahli pratama</td><td>Menyesuaikan</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Transformasi Digital Framework</td><td>Enterprise Architect & System Analyst</td><td>ahli utama / ahli madya / ahli pratama</td><td>Menyesuaikan</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Enterprise Architecture Foundation (TOGAF)</td><td>Enterprise Architect & System Analyst</td><td>ahli utama / ahli madya / ahli pratama</td><td>Menyesuaikan</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Enterprise Architecture Advanced (TOGAF)</td><td>Enterprise Architect & System Analyst</td><td>ahli madya / ahli pratama</td><td>Menyesuaikan</td></tr></table>			#	Domain	Jenis Pelatihan	Peran	Tingkat Jabatan	Waktu Pelaksanaan	1	Tata Kelola & Manajemen SPBE	Project Management Professional	Project Manager	ahli utama / ahli madya	Menyesuaikan			COBIT 2019	Project Manager & Enterprise Architect	ahli utama / ahli madya	Menyesuaikan			Manajemen SPBE meliputi : - Manajemen risiko SPBE - Manajemen keamanan informasi SPBE - Manajemen data - Manajemen SDM TIK - Manajemen aset TIK - Manajemen pengetahuan - Manajemen perubahan - Manajemen layanan	Umum	ahli utama / ahli madya / ahli muda	Menyesuaikan			Peta Proses Bisnis dengan BPMN	Enterprise Architect & System Analyst	ahli madya / ahli pratama	Menyesuaikan			Transformasi Digital Framework	Enterprise Architect & System Analyst	ahli utama / ahli madya / ahli pratama	Menyesuaikan			Enterprise Architecture Foundation (TOGAF)	Enterprise Architect & System Analyst	ahli utama / ahli madya / ahli pratama	Menyesuaikan			Enterprise Architecture Advanced (TOGAF)	Enterprise Architect & System Analyst	ahli madya / ahli pratama	Menyesuaikan
#	Domain	Jenis Pelatihan	Peran	Tingkat Jabatan	Waktu Pelaksanaan																																													
1	Tata Kelola & Manajemen SPBE	Project Management Professional	Project Manager	ahli utama / ahli madya	Menyesuaikan																																													
		COBIT 2019	Project Manager & Enterprise Architect	ahli utama / ahli madya	Menyesuaikan																																													
		Manajemen SPBE meliputi : - Manajemen risiko SPBE - Manajemen keamanan informasi SPBE - Manajemen data - Manajemen SDM TIK - Manajemen aset TIK - Manajemen pengetahuan - Manajemen perubahan - Manajemen layanan	Umum	ahli utama / ahli madya / ahli muda	Menyesuaikan																																													
		Peta Proses Bisnis dengan BPMN	Enterprise Architect & System Analyst	ahli madya / ahli pratama	Menyesuaikan																																													
		Transformasi Digital Framework	Enterprise Architect & System Analyst	ahli utama / ahli madya / ahli pratama	Menyesuaikan																																													
		Enterprise Architecture Foundation (TOGAF)	Enterprise Architect & System Analyst	ahli utama / ahli madya / ahli pratama	Menyesuaikan																																													
		Enterprise Architecture Advanced (TOGAF)	Enterprise Architect & System Analyst	ahli madya / ahli pratama	Menyesuaikan																																													

		<i>Scrum Master</i>	<i>Enterprise Architect & System Analyst</i>	ahli madya / ahli pratama	Menyesuaikan
2	Data	<i>Data Management With DMBOK</i>	<i>Data Scientist</i>	ahli madya / ahli pratama	Menyesuaikan
		<i>Database Administrator (MCDBA)</i>	<i>Programmer</i>	ahli pratama / ahli muda	Menyesuaikan
		Teknik Visualisasi Data dengan <i>Business Intelligence</i>	<i>Data Scientist</i>	ahli pratama / ahli muda	Menyesuaikan
		Pemrograman untuk Pengolahan Data dengan <i>Python & R Programming</i>	<i>Data Scientist</i>	ahli pratama / ahli muda	Menyesuaikan
		<i>Data Analytic With Machine Learning</i>	<i>Data Scientist</i>	ahli pratama / ahli muda	Menyesuaikan
		<i>Big Data Analytic In Practice</i>	<i>Data Scientist</i>	ahli pratama / ahli muda	Menyesuaikan
3	Aplikasi	<i>Backend Web API Programming</i>	<i>Programmer</i>	ahli muda	Menyesuaikan
		<i>Frontend Web Development</i>	<i>Programmer</i>	ahli muda	Menyesuaikan
		<i>Mobile Frontend With PWA</i>	<i>Programmer</i>	ahli muda	Menyesuaikan
		<i>Back-end Web Programming With Laravel</i>	<i>Programmer</i>	ahli muda	Menyesuaikan
		<i>Front-end Web Development With Vue JS</i>	<i>Programmer</i>	ahli muda	Menyesuaikan
		<i>Android Secure Programming</i>	<i>Programmer</i>	ahli muda	Menyesuaikan
		<i>Mobile Programming With Flutter</i>	<i>Programmer</i>	ahli muda	Menyesuaikan
		<i>IT Service Management</i>	<i>Application Support</i>	ahli muda	Menyesuaikan
		<i>IT Quality Assurance</i>	<i>Application Support</i>	ahli muda	Menyesuaikan
		<i>Software Testing Implementation</i>	<i>Application Support</i>	ahli muda	Menyesuaikan
		<i>Software Testing Plan</i>	<i>Application Support</i>	ahli muda	Menyesuaikan
4	Layanan	<i>IT Service Management</i>	<i>Enterprise Architect</i>	ahli madya / ahli pratama	Menyesuaikan
		Pengelolaan Layanan Operasional Pusat Data	<i>Network Engineer</i>	ahli muda	Menyesuaikan
5	Infrastruktur	<i>Network Security with Mikrotik</i>	<i>Network Engineer</i>	ahli muda	Menyesuaikan
		<i>Traffic Management with Mikrotik</i>	<i>Network Engineer</i>	ahli muda	Menyesuaikan
		<i>Linux Fundamental</i>	<i>Network Engineer</i>	ahli muda	Menyesuaikan
		<i>Linux Network Services</i>	<i>Network Engineer</i>	ahli muda	Menyesuaikan
		<i>DevOps Introduction & Docker</i>	<i>Network Engineer</i>	ahli muda	Menyesuaikan
		<i>Docker Administration With Kubernetes</i>	<i>Network Engineer</i>	ahli muda	Menyesuaikan

		Microservices In Development	Network Engineer	ahli muda	Menyesuaikan
		Pengelolaan Layanan Operasional Pusat Data	Network Engineer	ahli muda	Menyesuaikan
		Penetration Testing Method	Application Support	ahli muda	Menyesuaikan
		CompTIA ITF	Teknisi IT	ahli muda	Menyesuaikan
6	Keamanan Informasi	Ethical Hacking (CECH)	Auditor	ahli madya / ahli pratama	Menyesuaikan
		IT Auditor Fundamental	Auditor	ahli madya / ahli pratama	Menyesuaikan
		ISO 31000 (IT Risk And Controls)	Auditor	ahli madya / ahli pratama	Menyesuaikan
		ISO 27001 (Information Security Management)	Auditor	ahli madya / ahli pratama	Menyesuaikan
		Certified Information System Auditor	Auditor	ahli madya / ahli pratama	Menyesuaikan
7	Komunikasi Publik	Etika Komunikasi / Public Speaking	Digital Media Specialist	ahli pratama / ahli muda	Menyesuaikan
		Teknik Penulisan Artikel (Storytelling)	Digital Media Specialist	ahli pratama / ahli muda	Menyesuaikan
		Teknik Fotografi dan Videografi	Digital Media Specialist	ahli pratama / ahli muda	Menyesuaikan
		Teknik Publikasi Social Media	Digital Media Specialist	ahli pratama / ahli muda	Menyesuaikan
		Search Engine Optimization	Digital Media Specialist	ahli pratama / ahli muda	Menyesuaikan

2.2.6. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Pengetahuan (PR-M-006)

Tabel 2.2.6.1. Program Kerja Penyusunan dan Penerapan Manajemen Pengetahuan

Deskripsi	:	Manajemen Pengetahuan yaitu pengelolaan informasi dan pengetahuan dalam sebuah sistem pemerintahan yang didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi. Tujuannya adalah untuk menjaga dan mempertahankan pengetahuan yang telah didapatkan dari pengalaman operasional instansi pemerintahan.
Spesifikasi	:	1. Pembentukan komite manajemen pengetahuan 2. Penyusunan pedoman manajemen pengetahuan (kebijakan dan SOP) 3. Pelaksanaan manajemen pengetahuan dengan aplikasi 4. Evaluasi dan perbaikan manajemen pengetahuan
Indikator Pencapaian	:	1. Penerapan Manajemen Pengetahuan 2. Aplikasi <i>Knowledge Management System</i> (SIMPAN-SPBE) digunakan secara optimal.
Pelaksana	:	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun Pelaksanaan	:	2024-2028

Keterangan	: Dalam penyusunan Manajemen Pengetahuan mengikuti arahan kebijakan terkait manajemen SPBE yang berlaku seperti (Peraturan BRIN No 2 Tahun 2024) Manajemen Pengetahuan SPBE diterapkan dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 26.
------------	--

2.2.7. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Perubahan (PR-M-007)

Tabel 2.2.7.1. Program Kerja Penyusunan dan Penerapan Manajemen Perubahan

Deskripsi	: Manajemen Perubahan yaitu pendekatan siklus, dan sistematis pada transisi organisasi, program, dan kegiatan dari keadaan saat ini ke keadaan masa depan dengan target manfaat perubahan yang diharapkan.
Spesifikasi	: 1. Pembentukan komite manajemen perubahan 2. Penyusunan pedoman / SOP manajemen perubahan SPBE 3. Penyusunan form log manajemen perubahan 4. Pelaksanaan manajemen perubahan SPBE 5. Evaluasi dan perbaikan manajemen perubahan
Indikator Pencapaian	: 1. Penerapan Manajemen Perubahan. 2. Evaluasi Penerapan Manajemen Perubahan.
Pelaksana	: Bagian Organisasi
Tahun Pelaksanaan	2024-2028
Keterangan	: Dalam penyusunan Manajemen Perubahan mengikuti arahan kebijakan terkait manajemen SPBE yang berlaku. Manajemen Perubahan SPBE diterapkan dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 27.

2.2.8. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Layanan TIK (PR-M-008)

Tabel 2.2.8.1. Program Kerja Penyusunan dan Penerapan Manajemen Layanan TIK

Deskripsi	: Manajemen Layanan merupakan serangkaian proses pelayanan kepada pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan Aplikasi SPBE agar Layanan SPBE dapat berjalan berkesinambungan dan berkualitas.
Spesifikasi	: 1. Pemetaan kondisi terkini penyelenggaraan manajemen layanan di Lingkungan Pemerintah Daerah 2. Perumusan cakupan Manajemen Layanan sesuai dengan cakupan yang dimandatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE pasal 54. 3. Verifikasi data dan informasi eksisting pelaksanaan manajemen layanan di Pemerintah Daerah

	- Analisis kebutuhan proses pelayanan pengguna SPBE, pengoperasian layanan SPBE, dan pengelolaan aplikasi SPBE sesuai dengan ruang lingkup pada peraturan yang berlaku. - Analisis penyelenggara, kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) serta Peningkatan Kompetensi SPBE. - Penyusunan pedoman manajemen layanan sesuai dengan cakupan yang dimandatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE pasal 54.
Indikator Pencapaian	: Indikator keberhasilan manajemen layanan TIK meliputi - Kepuasan Pengguna Layanan TIK - Ketersediaan Layanan Setiap Saat - Efisiensi Penggunaan Layanan - Keamanan Data Pengguna Layanan
Pelaksana	: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Tahun Pelaksanaan	2024-2028
Keterangan	: Dalam penyusunan Manajemen Layanan mengikuti arahan kebijakan terkait manajemen SPBE yang berlaku. Manajemen Layanan SPBE diterapkan dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 28.

2.3. Layanan SPBE

2.3.1. Pengembangan Layanan RB Tematik (PR-L-001)

Tabel 2.3.3.1. Program Kerja Pengembangan Layanan RB Tematik

Deskripsi	: Pengembangan layanan Reformasi Birokrasi (RB) tematik pada pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Pendekatan tematik ini menekankan pada penanganan isu-isu spesifik yang menjadi prioritas, seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan Investasi, dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan dan program yang ada, dan juga bertujuan dalam percepatan dan keberlanjutan bagi transformasi digital pemerintahan terkait RB Tematik
Spesifikasi	: - Identifikasi Isu Tematik: Menentukan isu-isu spesifik yang menjadi fokus, seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan Investasi. - Perencanaan dan Implementasi: Membuat rencana strategis dan tindakan konkret untuk mengatasi isu-isu tersebut, termasuk penetapan tujuan, indikator kinerja, dan timeline. - Pelatihan dan Pengembangan SDM: Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) melalui pelatihan dan pengembangan profesional. - Penggunaan Teknologi Informasi: Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi

		untuk mempercepat dan mempermudah proses layanan, seperti e-governance dan digitalisasi dokumen. 5. Monitoring dan Evaluasi: Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program untuk memastikan tercapainya tujuan yang ditetapkan.
Detail	:	1. Pengembangan Layanan Kemiskinan 2. Pengembangan Layanan Pendidikan 3. Pengembangan Layanan Kesehatan 4. Pengembangan Layanan Investasi
Fitur		1. Dashboard Pemantauan Layanan RB Tematik 2. Sistem Pengaduan atau Komunikasi antara Pemilik Layanan (Pemerintah Daerah) dan Pengguna Layanan 3. Portal Informasi Terpadu
Indikator Pencapaian	:	1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik: Memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada masyarakat semakin berkualitas, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan. 2. Efisiensi dan Efektivitas: Mengurangi birokrasi yang tidak perlu dan mempercepat proses administrasi. 3. Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan keterbukaan dalam pemerintahan dan akuntabilitas terhadap penggunaan anggaran dan sumber daya. 4. Inovasi Pelayanan: Mengembangkan metode dan teknologi baru untuk meningkatkan pelayanan publik.
Pelaksana	:	Perangkat Daerah Terkait Layanan RB Tematik
Tahun Pelaksanaan		2024-2026
Keterangan	:	Tantangan dalam Pengembangan Layanan RB Tematik 1. Resistensi terhadap Perubahan: Adanya hambatan dari pihak-pihak yang kurang mendukung perubahan. 2. Sumber Daya Terbatas: Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang kompeten. 3. Koordinasi Antar Lembaga: Tantangan dalam menyelaraskan kebijakan dan program antar berbagai lembaga pemerintah..

2.3.2. Pengembangan Layanan Prioritas SPBE (PR-L-002)

Tabel 2.3.2.1. Program Kerja Pengembangan Layanan Prioritas SPBE

Deskripsi	:	Terkait Pengembangan Layanan Prioritas harus sejalan dengan Perpres 82 tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Indonesia, dimana pemerintah pusat
-----------	---	--

		berfokus pada 9 Layanan Prioritas yang bertujuan untuk mewujudkan Percepatan dan Keberlanjutan Transformasi Digital Pemerintah Indonesia.
Spesifikasi	:	Layanan yang menjadi prioritas Pusat antara lain : 1. Infrastruktur Publik Digital (DPI) a. Identitas Digital Dasar b. Platform Pertukaran Data c. Pembayaran Digital 2. Portal Layanan Publik a. Portal Layanan Publik b. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah c. SSO (Single Sign On) d. Pusat Data Nasional 3. Portal Administrasi Pemerintah 4. Layanan Publik Terintegrasi a. SIM Online b. Bantuan Sosial c. Kesehatan d. Pendidikan
Detail	:	a. perencanaan penyelenggaraan Aplikasi SPBE Prioritas; b. pembangunan dan/ atau pengembangan Aplikasi SPBE Prioritas; c. pengintegrasian Aplikasi SPBE Prioritas; d. pengoperasian Aplikasi SPBE Prioritas; e. keamanan Aplikasi SPBE Prioritas; f. distribusi dan/atau diseminasi Aplikasi SPBE Prioritas; g. pemeliharaan Aplikasi SPBE Prioritas; dan/ atau h. pengelolaan Infrastruktur SPBE yang mendukung Aplikasi SPBE Prioritas.
Fitur	:	1. Single Sign-On (SSO), yang memungkinkan pengguna mengakses berbagai aplikasi dengan satu set kredensial 2. API untuk memfasilitasi komunikasi dan pertukaran data antara sistem yang berbeda; 3. Data Synchronization, yang menjaga konsistensi data di seluruh aplikasi dengan memastikan data diperbarui secara otomatis di semua sistem terkait
Indikator Pencapaian	:	Dalam Percepatan Transformasi Digital dengan Pengembangan Portal Aplikasi ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan antara lain : 1. Menyatukan Layanan menjadi 1 Portal Layanan Publik dan 1 Portal Layanan Administrasi Pemerintah 2. Percepatan Pembangunan Layanan dan Sistem Digital Prioritas 3. Memperkuat Tim Transformasi Digital 4. Fokus pada kemudahan pengguna layanan
Pelaksana	:	Seluruh Perangkat Daerah Terkait Layanan SPBE Prioritas

Tahun Pelaksanaan	2024-2026
Keterangan	: Tantangan dalam Pengembangan Layanan Prioritas SPBE 1. Infrastruktur Teknologi: Memerlukan investasi yang signifikan dalam infrastruktur TI dan jaringan. 2. Keamanan dan Privasi: Menjaga keamanan data dan privasi pengguna menjadi prioritas utama. 3. Sumber Daya Manusia: Membutuhkan tenaga ahli dalam bidang TI dan manajemen proyek. 4. Resistensi terhadap Perubahan: Menghadapi resistensi dari pihak-pihak yang kurang mendukung perubahan menuju sistem elektronik. 5. Regulasi dan Kebijakan: Memerlukan pembaruan regulasi dan kebijakan yang mendukung implementasi SPBE.

2.3.3. Pengembangan Portal Layanan Terintegrasi (PR-L-003)

Tabel 2.3.3.1. Program Kerja Pengembangan Portal Layanan Terintegrasi

Deskripsi	: Aplikasi Portal Layanan Terintegrasi yang memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik dalam satu platform dan juga bertujuan dalam percepatan dan keberlanjutan bagi transformasi digital pemerintahan di layanan publik dan Layanan Internal pemerintah.
Spesifikasi	: 1. Identifikasi Sistem Informasi Layanan Publik dan Layanan Pemerintah Internal di setiap Perangkat Daerah 2. Penyusunan Konsep Desain Integrasi Portal Layanan 3. Proses Konsolidasi dan Integrasi Portal Layanan 4. Evaluasi Portal Layanan Terintegrasi
Detail	: Platform : Web Mobile Technology : LDAP, Keycloak untuk Single Sign On

Fitur :

Layanan Publik			
1	Reformasi Birokrasi		Portal RB
2	Transparasi Anggaran		-
3	Smart City		-
4	Berita dan Informasi	Informasi	Website Kabupaten Tasikmalaya
5	CCTV		CCTV Kabupaten Tasikmalaya
6	Titik Wifi publik		WIFI Publik Kabupaten Tasikmalaya
7	Telekomunikasi		-
8	Event		Tasikmalaya Kab
10	Profil Perangkat Daerah		Tasikmalaya Kab
11	Kependudukan	Layanan Kependudukan	SIDURU
12	Ketenagakerjaan	Pelatihan dan Magang	SIAPKerja
		Tenaga Kerja Asing	-
13	Pendidikan	Data Pokok Pendidikan	DAPODIK
		Beasiswa	-
		PPDB	PPDB Online
14	Perpustakaan	Perpustakaan Digital	INLISLite
15	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan	e-Puskesmas Klaster e-Dinkes
		Stunting	eHDW
16	Hukum	Diseminasi Kebijakan	JDIH
17	Perizinan	Peluang Investasi	OSS
		Perizinan Berusaha	OSS
18	Pembangunan Daerah	Realisasi Pembangunan Daerah	SIP2KP
		Penelitian dan Pengembangan Daerah	SIINIDA
19	Pajak Daerah	Pajak	APDOL
20	Marketplace	Data Koperasi	ODS
		Harga Pangan	Panel Harga Pangan Si Linda
		UMKM	-
21	Pariwisata	Destinasi Wisata	-
22	Sosial	Data Sosial	SIKS NG
23	Satu Data	Data Statistik	Portal Satu Data Kabupaten Tasikmalaya
24	Aduan Masyarakat	Aduan Umum	SP4N Laporan!
		Aduan WBS	
25	PPID	PPID	PPID Kabupaten Tasikmalaya
26	Pengadaan Barang dan Jasa		SIUKPBJ SPSE e-Catalog
27	Transportasi	Informasi Transportasi	
28	Social Media	Youtube	
		Instagram	
		Twitter	

	29	Televisi	TV Streaming	
	30	Radio	Radio Streaming	
	31	Kontak		
	32	Survei Kepuasan Masyarakat		
	Layanan Internal Pemerintahan			
	33	Pengumuman ASN		-
	34	Persuratan	Arsip	SRIKANDI
			TTE	Panther PSRe
	35	Kepegawaian	Profil Kepegawaian	SIMPEG
			Presensi	KETUPAT ASN
			Cuti dan Izin	KETUPAT ASN
			Tunjangan	-
			Promosi Mutasi	e-Mutasi DISPAKATI
			Formasi	-
			Kinerja Harian	KETUPAT ASN
			Manajemen Talenta	-
	36	Layanan TIK	Helpdesk TIK	-
			Keamanan Sistem Elektronik	-
	37	Dashboard Pimpinan		-
	38	Knowledge Management System		-
	39	Push Notification		Firebase
	40	Login Page		Keycloak
	41	About		-
	42	FAQ		-
Indikator Pencapaian	:	Terimplementasikannya portal layanan publik dan Portal Layanan Pemerintah Daerah yang saling terintegrasi		
Pelaksana	:	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta Perangkat Daerah Terkait		
Tahun Pelaksanaan		2024-2028		
Keterangan	:	Perlu membuat dokumentasi API untuk seluruh aplikasi layanan publik maupun layanan internal pemerintah Daerah dan menjadikan API Kependudukan dan API Kepegawaian sebagai primary key di seluruh aplikasi layanan yang ada.		

2.3.4. Pengembangan Platform Helpdesk TIK (PR-L-004)

Tabel 2.3.4.1. Program Kerja Pengembangan Platform Helpdesk TIK

Deskripsi	Semakin berkembangnya layanan Diskominfo kepada perangkat daerah/UPT perlu didukung layanan bantuan penanganan masalah secara cepat, tepat, dan terdokumentasi. Untuk melaksanakan layanan penanganan masalah diperlukan tata kelola dan alat bantu (<i>tools</i>).
Spesifikasi	- Tata Kelola Layanan Penanganan Masalah (<i>Helpdesk</i>) TIK - <i>Tools</i> atau aplikasi pendukung untuk pencatatan dan sebagai manajemen pengetahuan (<i>knowledge management</i>) - Petugas <i>helpdesk</i>
Indikator Pencapaian	- Tersedianya pedoman, standar, dan prosedur layanan penanganan gangguan/masalah (<i>helpdesk</i>) TIK - Tersedianya aplikasi untuk pencatatan dan sebagai manajemen pengetahuan sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan - Tersedianya petugas <i>helpdesk</i> yang menerima, mencatatkan, dan melakukan penanganan masalah pada tingkat pertama
Pelaksana	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Tahun Pelaksanaan	2024-2026
Keterangan	

2.3.5. Survey Pengguna Layanan (PR-L-004)

Tabel 2.3.5.1. Program Kerja Survey Penggunaan Layanan

Deskripsi	:	Melakukan survey kepada ASN dan Bisnis dan Masyarakat yang menggunakan layanan SPBE.
Spesifikasi		1. Survei Kepuasan Penggunaan Aplikasi Layanan Pemerintahan 2. Survei Kepuasan Penggunaan Aplikasi Layanan Publik
Detail	:	Melakukan survei dengan metode pengukuran efektivitas layanan SPBE
Indikator Pencapaian	:	Telah dilakukannya pengukuran layanan SPBE dan melakukan perbaikan atas masukan yang ada.
Pelaksana	:	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Bagian Organisasi
Tahun Pelaksanaan		2024-2028
Keterangan	:	Survey kepuasan pengguna SPBE juga perlu disandingkan dengan analisis Indeks Kepuasan Masyarakat di masing-masing jika diperlukan.

2.4. Aplikasi SPBE

2.4.1. Pengembangan Aplikasi (PR-A-001)

Tabel 2.4.1.1. Program Kerja Pengembangan Aplikasi

Deskripsi	: Pengembangan aplikasi yang diusulkan oleh Perangkat Daerah yang menjadi prioritas utama (yang paling mudah untuk diimplementasikan dan memberikan <i>impact</i> yang signifikan). Aplikasi yang bersifat pelayanan publik juga menjadi prioritas utama pengembangan.
Spesifikasi	: Daftar aplikasi usulan perangkat daerah yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut: Tahap 1 (Tahun 2025): 1. Pengembangan SIMPEG 2. Pengembangan e-Talenta 3. Pengembangan e-SKM 4. TKKSD 5. e-ASET Setda 6. SIPASUM 7. PPDB Online 8. Pengembangan PELUKAN 9. TTE PBB 10. Sistem Tata Kelola Hibah 11. Pengembangan VMS 12. SIDAKEP 13. Pengembangan Sahabat EBEN 14. Pengembangan ADIPATI 15. Pengembangan APDOL 16. Geopark Galunggung 17. Sistem Informasi Pembuatan Produk Hukum 18. JDIH DPRD Tahap 2 (Tahun 2026): 19. Pengembangan SATUDATA Kesehatan Terintegrasi 20. SIMADU KAB TASIK 21. IKM Terintegrasi 22. SIKW 23. SISPARPERAGA 24. SI JANTAN 25. SIIPAH 26. Portal Layanan Publik Kabupaten Tasikmalaya 27. GEOTASIK 28. Pengembangan SIMWAS Tahap 3 (Tahun 2027): 29. Komunikasi Pimpinan

		30. Sistem Layanan Administrasi Pimpinan 31. e-Office 32. SISAPTA POL PP
Indikator Pencapaian	:	Terimplementasinya aplikasi-aplikasi yang direncanakan.
Pelaksana	:	Perangkat Daerah terkait dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Tahun Pelaksanaan		2024-2026
Keterangan		Pengembangan dapat dilakukan secara mandiri dengan bantuan DISKOMINFO, maupun pengadaan aplikasi melalui pihak ketiga (vendor) sesuai kebijakan pada pemerintah daerah. Prioritas pengembangan aplikasi dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada tahun-tahun berjalan dan juga dari sisi pengguna apakah aplikasi tersebut merupakan aplikasi untuk layanan publik atau layanan di internal pemerintah daerah sendiri Pengembangan aplikasi seyogyanya berkoordinasi dengan DISKOMINFO dan mengikuti standar pengembangan teknologi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk menghindari lock-in vendor.

2.4.2. Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (API Gateway) (PR-A-002)

Tabel 2.4.2.1. Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (api gateway)

Deskripsi	:	Sistem penghubung layanan pemerintah untuk memfasilitasi Integrasi antara pemerintah dan masyarakat, serta memudahkan penyelenggaraan layanan publik.
Spesifikasi	:	1. Identifikasi kebutuhan bisnis dan tujuan penggunaan API Gateway. 2. Penyusunan Desain API Gateway 3. Pengembangan dan Konfigurasi API Gateway 4. Pengujian API Gateway 5. Implementasi API Gateway 6. Dokumentasi API Gateway 7. Pemeliharaan API Gateway
Indikator Pencapaian	:	Integrasi antar aplikasi sudah menggunakan API dan telah didokumentasikan dengan baik.
Pelaksana	:	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Perangkat Daerah terkait
Tahun Pelaksanaan		2024-2028

Keterangan	:	
------------	---	--

2.4.3. Pengembangan Portal Data dan Dashboard (Big Data) (PR-A-003)

Tabel 2.4.3.1. Pengembangan Portal Data dan Dashboard Analytics (Big Data)

Deskripsi	:	Guna mendukung pemanfaatan data sektoral sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pimpinan maka perlu <i>Data Warehouse</i> dan <i>Dashboard Analytics</i> .
Spesifikasi	:	Aplikasi <i>dashboard</i> dan <i>data warehouse</i> setidaknya akan memiliki fitur: 1. <i>Report builder</i>, memiliki kemampuan menyusun laporan secara <i>custom</i> sesuai kebutuhan pimpinan. 2. <i>Data mining</i> dan <i>warehousing</i>, memiliki kemampuan kustomisasi sumber data, dan memiliki <i>local temporary data</i>. 3. Integrasi <i>back office application</i>, yang secara default pengambilan data terintegrasi dengan aplikasi <i>back office</i> yang berjalan. 4. Aplikasi dashboard harus memiliki kualitas yang baik/<i>user friendly</i> saat diakses dari perangkat <i>mobile</i> maupun PC.
Indikator Pencapaian	:	Implementasi aplikasi <i>Data Warehouse</i> dan <i>Dashboard</i>
Pelaksana	:	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Perangkat Daerah terkait
Tahun Pelaksanaan	:	2024-2028
Keterangan	:	Pengembangan dilakukan secara bertahap setiap tahun sesuai dengan ketersediaan anggaran dan prioritas pengembangan aplikasi. Layanan Data Terbuka diterapkan dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 43

2.4.4. Pemeliharaan Aplikasi (PR-A-004)

Tabel 2.4.4.1. Program Kerja Pemeliharaan Aplikasi

Deskripsi	:	Pemeliharaan aplikasi untuk memastikan kinerja, keamanan, dan fungsionalitas berkelanjutan seiring berjalannya waktu. Aktivitas pemeliharaan dapat mencakup berbagai aspek, seperti pembaruan perangkat lunak, penambahan fitur baru, perbaikan bug, pemantauan kinerja, dan penanganan perubahan kebutuhan pengguna
Spesifikasi	:	Aktivitas pemeliharaan/<i>upgrade</i> terdiri atas: 1. Perbaikan Bug (Bug Fixing) 2. Pembaruan dan Penambahan Fitur (Feature Updates)

		3. Pembaruan Keamanan (Security Updates) 4. Optimasi Kinerja (Performance Optimization) 5. Pemantauan dan Analisis (Monitoring and Analytics) 6. Pemeliharaan Database 7. Manajemen Konfigurasi dan Versi 8. Penanganan Perubahan Kebutuhan Pengguna (Change Management)
Indikator Pencapaian	:	Aplikasi berjalan lancar secara <i>realtime</i> dan juga berjalan secara maksimal
Pelaksana	:	Perangkat Daerah Terkait dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Tahun Pelaksanaan		2024-2028
Keterangan	:	Pemeliharaan Aplikasi dilakukan ketika terjadi perubahan pada proses bisnis, fitur atau regulasi yang ada.

2.5. Infrastruktur SPBE

2.5.1. Peningkatan Kapasitas Ruangan dan Fasilitas Pendukung Pusat Data (PR-I-001)

Tabel 2.5.1.1. Peningkatan Kapasitas Ruangan dan Fasilitas Pendukung Pusat Data

Deskripsi	:	Pusat data merupakan lokasi penempatan perangkat <i>server</i> , <i>storage</i> , jaringan, dan keamanan jaringan. <i>Server-server</i> aplikasi yang dikelola oleh Diskominfo Pemerintah Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya berada di pusat data. Pusat Data Diskominfo perlu dipelihara untuk menjaga ketersediaan (<i>availability</i>), dan kinerja (<i>performance</i>) dari layanan infrastruktur <i>server</i> , dan jaringan. Pemeliharaan Pusat Data meliputi perangkat utama seperti <i>server</i> , <i>storage</i> , jaringan, dan keamanan jaringan. Selain itu fasilitas pendukung juga perlu pemeliharaan secara rutin seperti catu daya listrik cadangan (Genset, dan UPS), sistem pendingin udara (AC), sistem penanganan kebakaran (APAR), kelistrikan, dan lain-lain.
Spesifikasi	:	1. Letak Pusat Data berada gedung Diskominfo Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 2. Pembagian ruangan area ruang <i>server</i>, <i>staging</i>, kelistrikan, UPS dan <i>Battery</i>, AC Presisi dan <i>Fire Suppression System</i>. 3. Sistem Kelistrikan. 4. Sistem Pendingin. 5. Sistem Jaringan Data. 6. Sistem Penanganan Kebakaran. 7. Sistem Pemantau Kondisi Lingkungan. 8. Sistem Keamanan Fisik. 9. Pemeliharaan perangkat utama seperti <i>server</i>, <i>storage</i>, perangkat jaringan, dan keamanan meliputi Sistem Operasi, <i>firmware</i>, <i>patch</i>, dan suku cadang.

Indikator Pencapaian	: 1. Pembagian ruangan pusat data mengikuti standar dari SNI Pusat Data atau standar ANSI/TIA-942. 2. Fasilitas pendukung pusat data mengikuti standar dari SNI Pusat Data seperti adanya sistem pendingin ruangan terpusat, sistem pemadam kebakaran, dan lainnya. 3. Perlunya jalur khusus kabel data yang terpisah dengan kabel daya listrik dengan jarak minimal 40 - 60 cm. Kabel data perlu diberikan penanda (<i>labelling</i>). 4. Fasilitas utama dan fasilitas pendukung Pusat Data Diskominfo dipelihara secara mandiri atau menggunakan jasa pihak ketiga. 5. Sistem operasi, <i>firmware</i>, <i>patch</i> perangkat <i>server</i>, <i>storage</i>, jaringan, dan keamanan jaringan adalah versi yang stabil atau direkomendasikan oleh pabrikan dan tidak ada celah keamanan. 6. Laporan pemeliharaan perangkat utama dan perangkat pendukung Pusat Data Diskominfo secara periodik. 7. Tersedianya ruangan untuk gudang perangkat TIK.
Pelaksana	: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Tahun Pelaksanaan	2024-2028
Keterangan	: Pusat Data diterapkan dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 16.

2.5.2. Penyusunan Rencana Kapasitas (*Capacity Plan*) Infrastruktur Utama *Server* dan *Storage* (PR-I-002)

Tabel 2.5.2.1. Program Kerja Rencana Kapasitas Infrastruktur Utama *Server* dan *Storage*

Deskripsi	: Peningkatan rencana kapasitas (<i>Capacity Plan</i>) dilakukan untuk menjaga agar perangkat infrastruktur utama dan fasilitas pendukung pusat data dapat tetap beroperasi dengan normal. Kegiatan ini untuk menjaga ketersediaan dan keandalan dari layanan sistem informasi yang dikelola oleh Diskominfo. Rencana kapasitas meliputi kebutuhan spesifikasi teknis <i>server</i>, <i>storage</i>, infrastruktur jaringan, perangkat keamanan jaringan, dan fasilitas pendukung (sistem kelistrikan, luar ruangan, sistem pendingin).
Spesifikasi	: Kegiatan penyusunan rencana kapasitas infrastruktur utama <i>server</i> dan <i>storage</i> meliputi: 1. perangkat utama - <i>server untuk virtualisasi</i>; - <i>server colocation</i>; - <i>lisensi OS dan manajemen virtualisasi</i>; - <i>storage</i>; - perangkat jaringan; dan - perangkat keamanan jaringan.

		- fasilitas pendukung - sistem kelistrikan (<i>UPS, Genset</i>); - sistem pendingin ruangan (<i>AC</i>); - sistem pemadam kebakaran (<i>Fire Suppression, APAR</i>); dan - pengendali keamanan (<i>access door, CCTV</i>).
Indikator Pencapaian	:	Dokumen hasil rencana kapasitas infrastruktur utama <i>server</i> dan <i>storage</i> meliputi kondisi utilisasi perangkat minimal tiga bulan terakhir berdasarkan alat pemantau (<i>monitoring tools</i>), rencana pengembangan aplikasi/sistem, dan analisa kebutuhan pengembangan kapasitas.
Pelaksana	:	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Tahun Pelaksanaan		2024
Keterangan	:	-

2.5.3. Pengadaan Pusat Pemulihan Bencana (PR-I-003)

Tabel 2.5.3.1. Pengadaan Pusat Pemulihan Bencana

Deskripsi	:	Untuk menjaga tingkat ketersediaan dan kinerja layanan sistem informasi maka diperlukan lokasi cadangan penempatan server dan lainnya di Pusat Pemulihan Bencana. Sehingga jika terjadi kegagalan pada sistem informasi di pusat data maka operasionalisasi sistem aplikasi dipindah ke Pusat Pemulihan Bencana. Spesifikasi dan jumlah perangkat utama seperti <i>server, storage, jaringan</i> , dan keamanan di Pusat Pemulihan Bencana harus sama dengan yang ada di pusat data.
Spesifikasi	:	- Jarak fisik lokasi Pusat Pemulihan Bencana minimal lebih dari 40 km dari Pusat Data Diskominfo. - Aplikasi/sistem yang tergolong kritis sudah dilakukan replikasi/<i>backup</i> ke Pusat Pemulihan Bencana. - Spesifikasi dan jumlah perangkat utama seperti <i>server, storage, infrastruktur jaringan</i> dan keamanan jaringan di Pusat Pemulihan Bencana sama seperti yang ada di Pusat Data khususnya untuk server aplikasi yang tergolong kritis.
Indikator Pencapaian	:	- Pemilihan lokasi pusat pemulihan bencana minimal dengan jarak 40 km dari pusat data saat ini; - Lokasi pusat pemulihan bencana bisa menggunakan jasa dari pihak ketiga (<i>provider</i>); - Spesifikasi dan jumlah perangkat utama seperti <i>server, storage, infrastruktur jaringan</i> dan keamanan jaringan di Pusat Pemulihan Bencana sama seperti yang ada di pusat data khususnya untuk server aplikasi yang tergolong kritis. - Aplikasi/sistem yang tergolong kritis sudah dilakukan <i>backup/replikasi</i> ke Pusat

		Pemulihan Bencana.
Pelaksana	:	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Tahun Pelaksanaan		2024-2028
Keterangan	:	-

2.5.4. Uji Coba Pemulihan Bencana Secara Periodik (PR-I-004)

Tabel 2.5.4.1. Program Kerja Uji Coba Pemulihan Bencana Secara Periodik

Deskripsi	:	Untuk menjamin ketersediaan dan keandalan dari layanan Sistem Informasi di Pusat Pemulihan Bencana maka perlu dilakukan uji coba Rencana Pemulihan Bencana (<i>Disaster Recovery Plan - DRP</i>) secara periodik minimal satu tahun sekali. Kegiatan ini untuk memastikan <i>backup</i> dan replikasi yang sudah dilakukan dapat digunakan dan sesuai dengan harapan.
Spesifikasi	:	1. Tersedianya Pusat Pemulihan Bencana (DRC). 2. Spesifikasi dan jumlah server terutama yang tergolong kritis sama dengan yang ada di Pusat Data. 3. Aplikasi/Sistem Informasi terutama yang tergolong kritis sudah dilakukan <i>backup</i> dan replikasi <i>real time</i> ke Pusat Pemulihan Bencana.
Indikator Pencapaian	:	1. Tersedianya dokumen Kebijakan, Standar, dan Prosedur Rencana Pemulihan Bencana (DRP). 2. Status <i>backup</i> dan replikasi aplikasi, file, dan <i>database</i> dari pusat data ke Pusat Pemulihan Bencana berjalan normal. 3. File <i>backup</i> dan replikasi dapat digunakan dan sesuai dengan kondisi terakhir. 4. Infrastruktur dan layanan aplikasi di Pusat Pemulihan Bencana dapat digunakan untuk menggantikan yang ada di Pusat Data selama rentang waktu tertentu. 5. Dokumentasi dan evaluasi kegiatan pemulihan bencana dari Pusat Data ke Pusat Pemulihan Bencana.
Pelaksana	:	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Tahun Pelaksanaan		2024-2028
Keterangan	:	-

2.5.5. Peningkatan Kapasitas dan Keandalan Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah (PR-I-005)

Tabel 2.5.5.1. Peningkatan Kapasitas dan Keandalan Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah

Deskripsi	: Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah (JIP) yang dikelola oleh Diskominfo Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya meliputi jaringan internet, jaringan antar pusat data, jaringan di perangkat daerah/UPT, dan interkoneksi dengan lembaga lain. Infrastruktur JIP perlu dipelihara untuk menjamin ketersediaan dan keandalan dari layanan JIP kepada pengguna internal maupun eksternal (masyarakat).
Spesifikasi	: Infrastruktur JIP terdiri dari perangkat jaringan (<i>router, switch, access point</i>), perangkat keamanan jaringan (<i>next-generation firewall</i>), koneksi internet dari <i>provider</i> internet, jaringan kabel <i>fiber optic</i> , dan radio link yang menghubungkan ke perangkat daerah/UPT dan lokasi lainnya, kabel UTP, dan lainnya. Perangkat - perangkat yang tergolong kritis seperti <i>router internet</i> dan <i>switch core</i> terdiri dari 2 (dua) unit (<i>redundant</i>), dengan konfigurasi <i>High Availability (HA)</i> . Perangkat lainnya seperti <i>switch access</i> menggunakan <i>manageable switch</i> sehingga dapat dipantau, dan dikonfigurasi.
Indikator Pencapaian	: 1. Tersedianya koneksi jaringan internet lebih dari satu penyedia jasa layanan internet (ISP), dan dikonfigurasi aktif semua; 2. Tersedianya perangkat jaringan inti, seperti: <i>router, switch</i> inti, <i>next generation firewall</i> yang redundan. 3. Perangkat jaringan menggunakan yang <i>manageable</i> sehingga dapat dipantau melalui alat pemantau, dan dikonfigurasi secara jarak jauh (<i>remote</i>). 4. Berfungsinya perangkat jaringan untuk melayani interkoneksi jaringan intra pemda dan jaringan internet.
Pelaksana	: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Tahun Pelaksanaan	2024-2028
Keterangan	: Jaringan Intra Pemerintah Daerah diterapkan dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 17.

2.5.6. Pemeliharaan Jaringan Dalam Kab Interkoneksi Perangkat Daerah/UPT (PR-I-006)

Tabel 2.5.6.1. Pemeliharaan Jaringan Dalam Kab Interkoneksi Perangkat Daerah/UPT

Deskripsi	Koneksi jaringan dalam Kab (<i>Metropolitan Area Network</i>) yang menghubungkan <i>Network Operation Center</i> Diskominfo dengan kantor perangkat daerah/UPT di beberapa lokasi perlu terus dipelihara untuk menjaga ketersediaan, keandalan, dan keamanannya.
-----------	--

Spesifikasi	1. Perangkat Daerah/UPT sudah terkoneksi dengan NOC Diskominfo. 2. Akses aplikasi intranet berjalan dengan lancar. 3. Akses internet kantor perangkat daerah/UPT melalui NOC Diskominfo.
Indikator Pencapaian	1. Semua perangkat daerah/UPT sudah terkoneksi dengan jaringan intra yang dikelola oleh Diskominfo. 2. Infrastruktur jaringan koneksi antar perangkat daerah/UPT dalam masa pemeliharaan baik oleh pihak Diskominfo atau menggunakan pihak ketiga. 3. Jika pemeliharaan diserahkan kepada pihak ketiga, Diskominfo dan pihak ketiga menetapkan garansi layanan (SLA) dan waktu tanggap. 4. SLA yang telah ditetapkan dapat dipenuhi.
Pelaksana	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Tahun Pelaksanaan	2024-2028
Keterangan	-

2.5.7. Pengembangan Infrastruktur Jaringan Data Nirkabel (WiFi) Terintegrasi (PR-I-007)

Tabel 2.5.7.1. Pengembangan Infrastruktur Jaringan Data Nirkabel (WiFi) Terintegrasi

Deskripsi	Layanan jaringan data nirkabel (WiFi) yang dikelola oleh Diskominfo tersedia di kantor perangkat daerah/UPT, dan area umum tertentu. Pengguna yang menggunakan jaringan data nirkabel tersebut dapat mengakses aplikasi intranet, internet, maupun keduanya. Untuk menjamin ketersediaan, dan kinerja dari layanan jaringan data nirkabel maka infrastruktur jaringan data nirkabel perlu dikembangkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan lalu lintas data, proses, dan pengguna yang semakin besar serta untuk melindungi keamanan lalu lintas data.
Spesifikasi	1. Keamanan wifi menggunakan protokol keamanan WPA2-Enterprise (<i>Wireless Fidelity Protected Access 2-Enterprise</i>). Protokol ini menggunakan autentikasi 802.1X atau EAP (<i>Extensible Authentication Protocol</i>). EAP merupakan protokol layer 2 yang menggantikan PAP dan CHAP. 2. <i>Setting security WPA enterprise/corporate</i> ini membutuhkan sebuah server khusus yang berfungsi sebagai pusat autentikasi seperti Server RADIUS (<i>Remote Authentication Dial-In Service</i>). Dengan adanya radius server ini, otentikasi akan dilakukan per-client sehingga tidak perlu lagi memasukkan <i>passphrase</i> atau <i>network key</i> yang sama untuk setiap <i>client</i>. 3. Server RADIUS dapat menggunakan <i>Active Directory</i> atau LDAP.

	4. <i>Acces Point</i> mendukung mode <i>roaming</i> yakni jika pengguna berpindah tempat maka koneksi ke <i>Access Point</i> akan menyesuaikan dengan yang terdekat tanpa perlu melakukan otentikasi lagi. 5. Terdapat perangkat <i>WiFi Controller</i> untuk pengelolaan dan operasional (manajemen) <i>Access Point</i> dan lainnya.
Indikator Pencapaian	1. Terdapat perangkat <i>Wireless LAN Controller (WLC)</i> melakukan <i>setting</i> dan konfigurasi beberapa perangkat <i>access point</i> pada satu perangkat <i>controller</i>. 2. Otentikasi pengguna <i>WiFi</i> sudah menggunakan protokol keamanan <i>WPA2-Enterprise</i> berdasarkan <i>username</i> dan <i>password</i> yang tersimpan di <i>Server LDAP</i> atau <i>Active Directory</i>. 3. Pengguna yang berpindah tempat tidak perlu lagi melakukan otentikasi ulang.
Pelaksana	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Tahun Pelaksanaan	2024-2026
Keterangan	-

2.5.8. Pembangunan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) (PR-I-008)

Tabel 2.5.8.1. Pembangunan SPLP

Deskripsi	Sistem penghubung layanan pemerintah Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan dengan pemerintah pusat. Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah terdiri dari: a. Integrasi Data Proses integrasi dilakukan langsung pada basis data atau struktur data dari aplikasi dengan mengabaikan presentasi atau <i>business logic</i> ketika membuat integrasi. b. Integrasi Presentasi Proses integrasi dengan membuat antarmuka pengguna (<i>user interface</i>) yang menyediakan akses pada beberapa aplikasi. c. Integrasi Fungsional Diskominfo telah memiliki salah satu Sistem Penghubung Layanan Pemerintah yakni integrasi data dengan menggunakan teknologi API dan telah memiliki infrastruktur API <i>Management</i>. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah perlu diamankan untuk menjaga integritas dari data yang dipertukarkan serta untuk menjaga ketersediaan dari layanan.
Spesifikasi	1. API Gateway Intranet untuk layanan <i>service</i> aplikasi internal dengan koneksi intranet. 2. API Gateway Ekstranet untuk layanan <i>service</i> aplikasi Kementerian/Lembaga dengan koneksi internet. 3. Pengembangan portal dengan basis <i>Single Sign On</i> (SSO). 4. Perangkat perlindungan keamanan API Gateway.
Indikator Pencapaian	1. Tersedianya perangkat atau aplikasi untuk pengamanan SPL (API Gateway, SSO) yakni <i>Web Application Firewall</i> (WAF). 2. API Gateway, dan Sistem SSO terlindungi oleh WAF.
Pelaksana	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Tahun Pelaksanaan	2024-2026
Keterangan	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah diterapkan dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 18.

2.6. Keamanan Informasi

2.6.1. Penyusunan Kebijakan dan Manajemen Keamanan SPBE (PR-K-001)

Tabel 2.6.1.1 Program Kerja Penyusunan Kebijakan dan Manajemen Keamanan SPBE

Deskripsi	Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE. Manajemen Keamanan Informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi dalam SPBE. Manajemen Keamanan Informasi bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko Keamanan Informasi. Penerapan Keamanan Informasi berlandaskan penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (non-repudiation) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan aplikasi.
Spesifikasi	Penyusunan Kebijakan Keamanan dan Manajemen SPBE meliputi: - Penetapan ruang lingkup - penanggung jawab - perencanaan: penyusunan program, pendokumentasian, manajemen resiko - dukungan pengoperasian: penganggaran - evaluasi keamanan - perbaikan berkelanjutan Referensi yang dapat digunakan yakni Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,
Indikator Pencapaian	1. Tersedianya dokumen kebijakan dan manajemen keamanan SPBE sesuai dengan Perban BSSN Nomor 4 Tahun 2021. 2. Pelaksanaan sertifikasi ISO 27001:2022 pada layanan yang mengelola data penting Pemda dan data kependudukan.
Pelaksana	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Tahun Pelaksanaan	2024
Keterangan	-

2.6.2. Penyusunan SOP Keamanan Data dan Informasi (PR-K-002)

Tabel 2.6.2.1. Program Kerja Penyusunan SOP Keamanan Data dan Informasi

Deskripsi	Standar Teknis keamanan data dan informasi meliputi: 1. Kerahasiaan; 2. Keaslian; 3. Keutuhan; 4. Kenirsangkalan; dan 5. Ketersediaan.
Spesifikasi	Daftar SOP mengacu pada Standar Teknis pada Perban BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SOP Klasifikasi Informasi; 1. SOP Enkripsi (dengan sistem kriptografi); 2. SOP Pembatasan Akses terhadap Data dan Informasi; 3. SOP Verifikasi, dan Validasi Keaslian Data dan Informasi; 4. SOP Implementasi <i>Hash Function</i>; 5. SOP Pendeteksian Modifikasi; 6. SOP Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi; 7. SOP Sistem Pencadangan (<i>backup</i>); dan 8. SOP Sistem Pemulihan (<i>recovery</i>).
Indikator Pencapaian	1. Tersedianya dokumen standar teknis keamanan data dan informasi meliputi kerahasiaan, keaslian, keutuhan, kenirsangkalan, dan ketersediaan. 2. Tersedianya dokumen SOP untuk keamanan data dan informasi sesuai dengan rincian di spesifikasi.
Pelaksana	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Tahun Pelaksanaan	2024
Keterangan	-

2.6.3. Penyusunan SOP Keamanan Aplikasi SPBE (PR-K-003)

Tabel 2.6.3.1. Program Kerja Penyusunan SOP Keamanan Aplikasi SPBE

Deskripsi	Standar teknis keamanan aplikasi SPBE berbasis <i>web</i> meliputi: 1. Autentikasi. 2. Manajemen sesi. 3. Persyaratan kontrol akses. 4. Validasi <i>input</i>. 5. Kriptografi pada verifikasi statis. 6. Penanganan <i>error</i> dan pencatatan <i>log</i>. 7. Proteksi data. 8. Keamanan komunikasi. 9. Pengendalian kode berbahaya. 10. Logika bisnis. 11. File. 12. Keamanan API dan <i>web service</i>, dan 13. Keamanan konfigurasi. Standar Teknis keamanan aplikasi SPBE berbasis <i>mobile</i> meliputi: 1. Penyimpanan data dan persyaratan privasi; 2. Kriptografi; 3. Autentikasi dan manajemen sesi; 4. Komunikasi jaringan; 5. Interaksi <i>platform</i>; 6. Kualitas kode dan pengaturan <i>build</i>; dan 7. Ketahanan.
Spesifikasi	Standar dan prosedur keamanan aplikasi berdasarkan Perban BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik: 1. Standar kata sandi (<i>password</i>) meliputi jumlah karakter, kombinasi jenis karakter, dan masa berlaku dari kata sandi; 2. SOP Klasifikasi Data, untuk data tergolong rahasia seperti kata sandi maka penyimpanannya dengan mekanisme kriptografi; 3. SOP Jalur Komunikasi Aplikasi yang Aman; 4. SOP Kontrol Akses Aplikasi; 5. SOP Kriptografi; 6. SOP Rekam Jejak; 7. SOP <i>Error Handling</i> Aplikasi; 8. SOP Pertukaran, Penghapusan, dan Audit Informasi; 9. SOP Sertifikat Elektronik; dan 10. SOP Konfigurasi <i>Server</i>;

Indikator Pencapaian	a. Tersedianya dokumen standar teknis keamanan aplikasi <i>web</i> meliputi: - o Autentikasi, - o Manajemen sesi; - o Persyaratan kontrol akses; - o Validasi <i>input</i>; - o Kriptografi pada verifikasi statis; - o Penanganan <i>error</i> dan pencatatan <i>log</i>; - o Proteksi data; - o Keamanan komunikasi; - o Pengendalian kode berbahaya; - o Logika bisnis; - o File; - o Keamanan API dan <i>web service</i>; dan - o Keamanan konfigurasi. b. Tersedianya dokumen SOP untuk keamanan aplikasi web sesuai dengan rincian di spesifikasi; c. Tersedianya dokumen standar teknis keamanan aplikasi mobile meliputi: - o penyimpanan data dan persyaratan privasi; - o kriptografi; - o autentikasi dan manajemen sesi; - o komunikasi jaringan; - o interaksi <i>platform</i>; - o kualitas kode dan pengaturan <i>build</i>; dan - o ketahanan. d. Tersedianya dokumen SOP untuk keamanan aplikasi mobile sesuai dengan rincian di spesifikasi.
Pelaksana	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Tahun Pelaksanaan	2024
Keterangan	-

2.6.4. Penyusunan SOP Keamanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (PR-K-004)

Tabel 2.6.4.1. Program Kerja Penyusunan SOP Keamanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Deskripsi	Standar teknis keamanan Sistem Penghubung Layanan meliputi: 1. keamanan interoperabilitas data dan informasi 2. kontrol sistem integrasi 3. kontrol perangkat integrator 4. keamanan API dan <i>web service</i> 5. keamanan migrasi data
Spesifikasi	Standar dan prosedur Keamanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah berdasarkan Perban BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik: 1. SOP Dokumen dan Surat Elektronik 2. SOP <i>Update</i> Sistem Operasi dan Perangkat Lunak 3. SOP Sistem <i>Recovery</i> dan <i>Restore</i> pada perangkat integrator 4. SOP Migrasi Data 5. SOP Implementasi Kriptografi pada proses Penyimpanan dan Pengambilan Data 6. SOP Validasi Data ketika Proses Migrasi Data Selesai
Indikator Pencapaian	Tersedianya dokumen standar teknis keamanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah meliputi: 1. keamanan interoperabilitas data dan informasi 2. kontrol sistem integrasi 3. kontrol perangkat integrator 4. keamanan API dan <i>web service</i> 5. keamanan migrasi data Tersedianya dokumen SOP keamanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sesuai dengan rincian di spesifikasi.
Pelaksana	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Tahun Pelaksanaan	2024
Keterangan	SOP SPLP Daerah diterapkan dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 18.

2.6.5. Penyusunan SOP Keamanan Jaringan Intra Pemerintah (PR-K-005)

Tabel 2.6.5.1. Program Kerja Penyusunan SOP Keamanan Jaringan Intra Pemerintah

Deskripsi	Standar teknis keamanan Jaringan Intra Pemerintah berdasarkan Perban BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik meliputi: 1. Aspek administrasi keamanan jaringan intra; 2. Kontrol akses dan autentikasi; 3. Persyaratan perangkat dan aplikasi keamanan jaringan intra; 4. Kontrol keamanan <i>gateway</i>; 5. Kontrol keamanan <i>access point</i> pada jaringan nirkabel; dan 6. Kontrol konfigurasi <i>access point</i> pada jaringan nirkabel.
Spesifikasi	1. Dokumen arsitektur jaringan intra 2. Dokumen aset infrastruktur jaringan 3. SOP Pemeliharaan keamanan jaringan intra 4. Laporan pengawasan keamanan jaringan secara periodik 5. SOP akses perangkat jaringan 6. SOP konfigurasi perangkat jaringan 7. SOP layanan <i>Virtual Private Network</i> (VPN) 8. SOP akses <i>server database</i> 9. Aplikasi <i>security information and event management</i> untuk <i>network logging, monitoring, dan analytics</i> 10. Perangkat <i>next generation firewall</i> (termasuk IPS atau IDS) 11. SOP pembaruan sistem operasi, <i>firmware</i>, dan <i>patch</i> perangkat jaringan 12. Perangkat <i>load balancer</i> koneksi jaringan dan aplikasi <i>web</i> 13. Perangkat <i>Web Application Firewall</i> (WAF) 14. Pemasangan sertifikat elektronik 15. Penerapan <i>content filtering</i> 16. SOP akses jarak jauh 17. SOP layanan akses <i>WiFi</i> 18. Implementasi SSID untuk jaringan nirkabel

Indikator Pencapaian	Tersedianya dokumen standar teknis keamanan Jaringan Intra Pemerintah meliputi: 1. Aspek administrasi keamanan Jaringan Intra 2. Kontrol akses dan autentikasi 3. Persyaratan perangkat dan aplikasi keamanan Jaringan Intra 4. Kontrol keamanan <i>gateway</i> 5. Kontrol keamanan <i>access point</i> pada jaringan nirkabel 6. Kontrol konfigurasi <i>access point</i> pada jaringan nirkabel Tersedianya dokumen SOP keamanan Jaringan Intra Pemerintah sesuai dengan rincian di spesifikasi. Terdapat perangkat pendukung keamanan jaringan Intra meliputi: 1. <i>Next Generation Firewall</i> termasuk didalamnya fitur IPS/IDS 2. <i>Web Application Firewall (WAF)</i> 3. <i>Load Balancer</i> untuk koneksi jaringan 4. <i>Load Balancer</i> untuk aplikasi <i>web</i> 5. Perangkat <i>Content Filtering</i> 6. Sertifikat SSL
Pelaksana	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Tahun Pelaksanaan	2024,2025,2026
Keterangan	SOP Jaringan Intra Pemerintah diterapkan dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 17.

2.6.6. Sertifikasi Standar Keamanan Informasi (Indeks KAMI/ ISO 27001) (PR-K-006)

Tabel 2.6.6.1. Program Kerja Sertifikasi Standar Keamanan Informasi (Indeks KAMI/ ISO 27001)

Deskripsi	Layanan TIK SPBE (Aplikasi, Jaringan, <i>Data Center</i>) perlu disertifikasi keamanannya untuk menjamin tingkat keamanan dan kepercayaan dari pengguna. Standar sertifikasi dapat mengacu pada standar internasional keamanan informasi yakni ISO 27001.
Spesifikasi	- Ruang Lingkup Sertifikasi - Asesmen awal menggunakan Indeks KAMI - Pendampingan Sertifikasi - Sertifikasi ISO 27001 oleh lembaga yang sudah tersertifikasi KAN (Komite Akreditasi Nasional)

Indikator Pencapaian	- Identifikasi ruang lingkup untuk standar keamanan informasi (indeks KAMI/ISO 27001) - Pendampingan sertifikasi ISO 27001 atau indeks KAMI - Sertifikasi ISO 27001 atau indeks KAMI
Pelaksana	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Tahun Pelaksanaan	2024,2026,2028
Keterangan	-

2.6.7. Penilaian Kerentanan dan Pengujian Penetrasi (PR-K-007)

Tabel 2.6.7.1. Program Kerja Penilaian Kerentanan dan Pengujian Penetrasi

Deskripsi	Penilaian Kerentanan dan Pengujian Penetrasi (<i>Vulnerability Assessment and Penetration Testing - (VAPT)</i>) terhadap jaringan, <i>server</i> , dan aplikasi yang dikelola oleh DISKOMINFO.
Spesifikasi	1. Penilaian Kerentanan (<i>Vulnerability Assessment</i>) jaringan, <i>server</i>, dan aplikasi <i>web</i> 2. <i>Penetration Testing</i> terhadap jaringan, <i>server</i>, dan aplikasi <i>web</i> menggunakan metode <i>black box</i> 3. Dokumen hasil asesmen dan <i>penetration testing</i> beserta rekomendasinya
Indikator Pencapaian	1. Identifikasi ruang lingkup penilaian kerentanan dan pengujian penetrasi 2. Pelaksanaan penilaian kerentanan dan pengujian penetrasi 3. Evaluasi hasil pelaksanaan penilaian kerentanan dan pengujian penetrasi
Pelaksana	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Tahun Pelaksanaan	2024,2025,2026,2027,2028
Keterangan	-

2.6.8. Edukasi dan Sosialisasi Keamanan SPBE (PR-K-008)

Tabel 2.6.9.1. Program Kerja Edukasi Keamanan SPBE

Deskripsi	Serangan siber akan terus meningkat frekuensinya dan tekniknya. Objek yang paling rentan terhadap serangan keamanan siber adalah manusianya. Oleh karena itu kesadaran keamanan informasi harus selalu ditingkatkan melalui edukasi dan sosialisasi.
Spesifikasi	1. Penentuan strategi edukasi dan sosialisasi keamanan SPBE 2. Pembentukan tim pelaksana 3. Implementasi edukasi dan sosialisasi keamanan SPBE 4. Evaluasi hasil implementasi edukasi dan sosialisasi keamanan SPBE 5. Tindak lanjut dari hasil evaluasi
Indikator Pencapaian	1. Tersedianya dokumen strategi edukasi dan sosialisasi keamanan SPBE 2. Tersedianya tim pelaksana 3. Implementasi edukasi keamanan SPBE melalui kegiatan webinar, <i>focus group discussion</i> (FGD), simulasi, dan lain - lain 4. Implementasi sosialisasi keamanan SPBE melalui sosial media (instagram, WA Group, Facebook, dll) secara periodik 5. Tersedianya dokumentasi evaluasi 6. Tersedianya dokumentasi tindak lanjut
Pelaksana	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Tahun Pelaksanaan	2024
Keterangan	-

2.7. Audit SPBE

2.7.1. Pelaksanaan Audit TIK (PR-AT-001)

Tabel 2.7.1.1. Program kerja Audit TIK

Deskripsi	: Melakukan Audit TIK secara berkala
Spesifikasi	: Audit SPBE dilakukan secara internal dan eksternal, Audit TIK terdiri atas : 1. Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE. a. Pembentukan tim audit aplikasi SPBE b. Pelaksanaan audit internal aplikasi SPBE c. Pelaksanaan audit eksternal aplikasi SPBE d. Evaluasi hasil pelaksanaan audit aplikasi SPBE e. Perbaiki aplikasi SPBE sesuai rekomendasi hasil audit

	2. Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE. a. Pembentukan tim audit infrastruktur SPBE b. Pelaksanaan audit internal infrastruktur SPBE c. Pelaksanaan audit eksternal infrastruktur SPBE d. Evaluasi hasil pelaksanaan audit infrastruktur SPBE e. Perbaikan infrastruktur SPBE sesuai rekomendasi hasil audit 3. Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE a. Pembentukan tim audit keamanan SPBE b. Pelaksanaan audit internal keamanan SPBE c. Pelaksanaan audit eksternal keamanan SPBE d. Evaluasi hasil pelaksanaan audit keamanan SPBE e. Perbaikan keamanan SPBE sesuai rekomendasi hasil audit
Indikator Pencapaian	: Terlaksananya Audit SPBE secara periodik
Pelaksana	: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Inspektorat
Tahun Pelaksanaan	2024-2028
Keterangan	: Audit TIK diterapkan dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 29-31.

Bab III Peta Rencana SPBE

3.1. Penyelarasan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya 2024-2028

Setelah memilih program/kegiatan SPBE yang sesuai dengan kriteria, program/kegiatan tersebut kemudian disusun secara hierarki berdasarkan tiga tingkatan yang berbeda. Tingkat pertama mewakili tujuh muatan yang diamanatkan dalam Perpres 95 tentang SPBE. Tingkat kedua merupakan sasaran strategis yang juga diamanatkan dalam Perpres dan juga dokumen perencanaan daerah. Tingkat ketiga menyajikan program/kegiatan rinci yang akan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD atau RPD) terutama pada bagian Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan peraturan terkait lainnya. Adapun aktivitas yang menjadi bagian dari peta rencana SPBE juga berisikan aktivitas-aktivitas yang disusun untuk memperkuat pelaksanaan gerakan SPBE untuk peningkatan maturitas atau kematangan pelaksanaan indikator-indikator yang ada di SPBE. Tabel 3.1.1 dibawah ini menyajikan program/kegiatan SPBE Pemerintah Daerah dalam Peta Rencana yang dilaksanakan sesuai dengan periodisasi Perencanaan Daerah.

Tabel 3.1.1 Peta Rencana SPBE
(Penyelarasan RKA Perangkat Daerah)

No.	Proyek/Aktivitas			UIC	Target				
					2024	2025	2026	2027	2028
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat									
Indikator	Indeks Kesehatan			77,14	77,14	77,14			
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD:									
1	Aplikasi								
	A	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		Dinas Kesehatan					
		A.1	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Sudah	Belum	Belum	Belum	

No.	Proyek/Aktivitas			UIC	Target				
					2024	2025	2026	2027	2028
	B	Urusan Penyelenggaraan Psu Perumahan		Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup					
		B.1	Penyediaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian		Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS:Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya									
Indikator	Indeks Pendidikan				60,32	60,62	60,91		
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD:									
1	Manajemen								
	A	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
		A.1	Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Paud		Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum
		A.2	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum
	B	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					

No.	Proyek/Aktivitas			UIC	Target				
					2024	2025	2026	2027	2028
		B.1	Bimbingan Teknis, Pelatihan, Dan/Atau Magang/Pkl Untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		Dalam Proses	Belum	Belum	Belum	Belum
		B.2	Bimbingan Teknis, Pelatihan, Dan/Atau Magang/Pkl Untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		Dalam Proses	Belum	Belum	Belum	Belum
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sektor pertanian, perikanan, KUMKM, Perindustrian, perdagangan dan pariwisata berbasis pedesaan									
Indikator	PDRB Per Kapita				27,71	29,14	30,57		
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD:									
1	Aplikasi								
	A	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan					
		A.1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri		Dalam Proses	Belum	Belum	Belum	Belum

No.	Proyek/Aktivitas		UIC	Target				
				2024	2025	2026	2027	2028
2	Manajemen							
	A	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran Dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan					
	A.1	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Dalam Prosees	Belum	Belum	Belum	Belum
	B	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga					
	B.1	Peningkatan Kerjasama Dan Kemitraan Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri		Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum
	C	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan					

No.	Proyek/Aktivitas			UIC	Target				
					2024	2025	2026	2027	2028
		C.1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan		Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum
	D	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja					
		D.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yangberakibat/Berdampak Pada Kepentingan Di 1 (Satu) Daerahkabupaten/Kota		Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum
		D.2	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum
	E	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga					

No.	Proyek/Aktivitas			UIC	Target				
					2024	2025	2026	2027	2028
		E.1	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum
	F	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan					
		F.1	Penyusunan Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Dalam Prosees	Belum	Belum	Belum	Belum
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas									
Indikator	Nilai LPPD				3,40 (Sedang)	3,42 (Tinggi)	3,44 (Sangat Tinggi)		
	Nilai SAKIP				69 (B)	71 (B)	75 (B)		
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD:									
1	Aplikasi								
	A	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Bagian Hukum					
		A.1	Pendokumentasian Produk Hukum Danpengelolaan Informasi Hukum		Dalam Proses	Belum	Belum	Belum	Belum

No.	Proyek/Aktivitas		UIC	Target				
				2024	2025	2026	2027	2028
	B	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika					
	B.1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum
	C	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah					
	C.1	Pengamanan Barang Milik Daerah		Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum
	D	Pengelolaan Data Dan Informasi ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia					
	D.1	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum

No.	Proyek/Aktivitas			UIC	Target				
					2024	2025	2026	2027	2028
		D.2	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum
	E	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika					
		E.1	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkalakendaraan Bermotor		Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum
2	Infrastruktur								
	A	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika					
		A.1	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah		Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum
		A.2	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah		Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum
	B	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika					
		B.1	Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum

No.	Proyek/Aktivitas			UIC	Target				
					2024	2025	2026	2027	2028
	C	Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika					
		C.1	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum
3	Manajemen								
	A	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga					
		A.1	Pengembangan Kompetensi Sdm Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum
	B	Pengelolaan Data Dan Informasi ASN		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia					
		B.1	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum
	C	Pengembangan Kompetensi Teknis		Badan Kepegawaian dan Pengembangan					

No.	Proyek/Aktivitas		UIC	Target				
				2024	2025	2026	2027	2028
			Sumber Daya Manusia					
		C.1	Pembinaan, Penguasaan, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, Dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, Dan Urusan Pemerintahan Umum	Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum
		C.2	Pembinaan, Penguasaan, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, Dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, Dan Urusan Pemerintahan Umum	Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum

No.	Proyek/Aktivitas			UIC	Target				
					2024	2025	2026	2027	2028
		C.3	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, Dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, Dan Urusan Pemerintahan Umum		Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum
		C.4	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, Dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, Dan Urusan Pemerintahan Umum		Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum
		C.5	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, Dan Pilihan		Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum

No.	Proyek/Aktivitas			UIC	Target				
					2024	2025	2026	2027	2028
			Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, Dan Urusan Pemerintahan Umum						
	D	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia					
		D.1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, Dan Prajabatan		Sudah	Belum	Belum	Belum	
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: Meningkatnya Realisasi Investasi Kabupaten Tasikmalaya									
Indikator	Pertumbuhan Realisasi Investasi				4	5	5		
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD:									
1	Manajemen								

No.	Proyek/Aktivitas			UIC	Target				
					2024	2025	2026	2027	2028
	A	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja					
		A.1	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Dalam Proses	Belum	Belum	Belum	Belum
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial, Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan sosial									
Indikator									
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD:									
1	Aplikasi								
	A	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
		A.1	Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan		Dalam Proses	Belum	Belum	Belum	Belum
2	Manajemen								
	A	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
		A.1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (Kie)		Dalam Proses	Belum	Belum	Belum	Belum

No.	Proyek/Aktivitas			UIC	Target				
					2024	2025	2026	2027	2028
			Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)						
	B	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
		B.1	Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum
	C	Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Dalam Satu (1) Daerah Kab/Kota		Satuan Polisi Pamong Praja					
		C.1	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketenteraman Dan Ketertiban Umum		Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum
		C.2	Peningkatan Kapasitas Sdm Satuan Polisi Pamong Praja Dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia		Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum

No.	Proyek/Aktivitas		UIC	Target					
				2024	2025	2026	2027	2028	
	D	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Dan Peraturan Bupati/Walikota		Satuan Polisi Pamong Praja					
		D.1	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Dan Peraturan Bupati/Walikota Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum
		D.2	Sosialisasi Penegakan Perda Dan Perkada		Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum
	E	Pengendalian Harga, Dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kab/Kota		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan					
		E.1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Belum	Belum	Belum	Belum	Belum
	F	Penyusunan Rencana TenagaKerja (RTK)		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan					

No.	Proyek/Aktivitas			UIC	Target				
					2024	2025	2026	2027	2028
				Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja					
		F.1	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro		Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: penyelenggaraan pemerintahan di daerah									
Indikator	Indeks Kepuasan Masyarakat				80,15 Baik	80,30 Baik	80,50 Baik		
	Indeks Kepuasan Masyarakat				69,5	70,5	71,5		
	Indeks Profesionalitas ASN				60	61	62		
	Indeks Inovasi Daerah				49 (Inovatif)	55 (Inovatif)	60 (Sangat Inovatif)		
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD:									
1	Aplikasi								
	A	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Inspektorat Daerah					
		A.1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pada Skpd		Dalam Proses	Belum	Belum	Belum	Belum
	B	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga					

No.	Proyek/Aktivitas			UIC	Target				
					2024	2025	2026	2027	2028
		B.1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pada Skpd		Tidak	Belum	Belum	Belum	Belum
	C	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah					
		C.1	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Pajakdaerah		Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum
		C.2	Perencanaan Pengelolaan Pajakdaerah		Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum
	D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Bagian Umum, Kearsipan dan Perpustakaan					
		D.1	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya		Dalam Proses	Belum	Belum	Belum	Belum
	E	Protokol Dan Komunikasi Pimpinan		Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan					
		E.1	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Dalam Proses	Belum	Belum	Belum	Belum
2 Infrastruktur									

No.	Proyek/Aktivitas		UIC	Target				
				2024	2025	2026	2027	2028
	A	Administrasi Umum	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia					
	A.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik		Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum
	A.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik		Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum
	B	Administrasi Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					
	B.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik		Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum
	C	Administrasi Umum	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah					
	C.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik		Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum
	C.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik		Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum
	D	Administrasi Umum	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan					

No.	Proyek/Aktivitas			UIC	Target				
					2024	2025	2026	2027	2028
				Pengembangan Daerah					
		D.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik		Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum
	E	Administrasi Umum		Bagian Umum, Kearsipan dan Perpustakaan					
		E.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik		Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum
	F	Administrasi Umum		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
		F.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik		Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum
	G	Administrasi Umum		Dinas Kesehatan					
		G.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik		Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum
	H	Administrasi Umum		"Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup "					

No.	Proyek/Aktivitas			UIC	Target				
					2024	2025	2026	2027	2028
		H.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik		Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum
	I	Administrasi Umum		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
		I.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik		Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum
	J	Administrasi Umum		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja					
		J.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik		Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum
	K	Administrasi Umum		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
		K.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik		Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum
	L	Administrasi Umum		Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan					
		L.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik		Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum
	M	Administrasi Umum		Satuan Polisi Pamong Praja					

No.	Proyek/Aktivitas			UIC	Target				
					2024	2025	2026	2027	2028
		M.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik		Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum
	N	Administrasi Umum		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah					
		N.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik		Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum
	O	Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
		O.1	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya		Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum
3	Manajemen								
	A	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah					
		A.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
	B	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan					

No.	Proyek/Aktivitas			UIC	Target				
					2024	2025	2026	2027	2028
				Menengah, Perindustrian dan Perdagangan					
		B.1	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Belum	Belum	Belum	Belum	Belum
	C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Inspektorat Daerah					
		C.1	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Belum	Belum	Belum	Belum	Belum
	D	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Inspektorat Daerah					
		D.1	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya		Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum
	E	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
		E.1	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor		Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum
	F	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					

No.	Proyek/Aktivitas			UIC	Target				
					2024	2025	2026	2027	2028
		F.1	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor		Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum
	G	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan					
		G.1	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor		Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum
	H	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga					
		H.1	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor		Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum
	I	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
		I.1	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor		Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum

No.	Proyek/Aktivitas			UIC	Target				
					2024	2025	2026	2027	2028
	J	Analisis Data Dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah					
		J1	Pembinaan Dan Pemanfaatan Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah		Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum
	K	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dibidang Pembangunan Manusia		Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah					
		K.1	Penerapan Sistem Informasi Pemererintah Daerah Di Bidang Pembangunan Daerah		Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum
	L	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah					
		L.1	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan Danpertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum

No.	Proyek/Aktivitas			UIC	Target				
					2024	2025	2026	2027	2028
		L.2	Pembinaan Pengelolaankeuangan Bludkabupaten/Kota		Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum
	M	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
		M.1	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum
	N	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah					
		N.1	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya		Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum
	O	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa					
		O.1	Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa		Dalam Proses	Belum	Belum	Belum	Belum
	Q	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					

No.	Proyek/Aktivitas			UIC	Target				
					2024	2025	2026	2027	2028
		Q.1	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya		Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum
	R	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Satuan Polisi Pamong Praja					
		R.1	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya		Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum
	S	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Bagian Umum, Kearsipan dan Perpustakaan					
		S.1	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya		Dalam Proses	Belum	Belum	Belum	Belum
	T	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia					
		T.1	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya		Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum
	U	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah					

No.	Proyek/Aktivitas			UIC	Target				
					2024	2025	2026	2027	2028
		U.1	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya		Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum
	V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah					
		V.1	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya		Dalam Proses	Belum	Belum	Belum	Belum
	W	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup					
		W.1	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya		Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum
	X	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan					
		X.1	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya		Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum

No.	Proyek/Aktivitas		UIC	Target					
				2024	2025	2026	2027	2028	
	Y	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja					
		Y.1	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya		Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum
	Z	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
		Z.1	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
	AA	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah					
		AA.1	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum
	AB	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					

No.	Proyek/Aktivitas			UIC	Target				
					2024	2025	2026	2027	2028
		AB.1	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan		Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum
	AC		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					
		AC.1	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan		Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum
	AD		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					

No.	Proyek/Aktivitas		UIC	Target				
				2024	2025	2026	2027	2028
		Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						
		AD.1 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah		Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.								
Indikator	Indeks Pembangunan Gender (IPG)			86,73	86,02	87,45		
	Indikator Kabupaten Layak Anak			595 (Menuju Madya)	615 (Menuju Madya)	625 (Menuju Madya)		
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD:								
1	Manajemen							
	A	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga					

No.	Proyek/Aktivitas		UIC	Target				
				2024	2025	2026	2027	2028
		dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
	A.1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-Rdan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum
	B	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
	B.1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang		Dalam Proses	Belum	Belum	Belum	Belum

No.	Proyek/Aktivitas			UIC	Target				
					2024	2025	2026	2027	2028
			Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota						
	C		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab/Kota	Bagian Umum, Kearsipan dan Perpustakaan					
		C.1	Sosialisasi Budaya Baca Dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat		Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum
	D		Pengendalian Dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan Kb Di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					

No.	Proyek/Aktivitas			UIC	Target				
					2024	2025	2026	2027	2028
		D.1	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum
	E	Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
		E.1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum

3.2. Peta Rencana Pemenuhan Indeks SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya 2024-2028

Tabel 3.2.1 dibawah ini menyajikan program/kegiatan SPBE Pemerintah Daerah dalam Peta Rencana yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pemenuhan tingkat kematangan pada indikator penilaian indeks SPBE.

Tabel 3.2.1 Peta Rencana SPBE
(Pemenuhan Indeks SPBE)

Misi : Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih, dan Profesional.							
Tujuan : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik							
Sasaran : Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas							
		2023	2024	2025	2026		
Indikator	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	80,15	80,3	80,5		

No	Project/Activities			Koordinator UIC	Baseline	Target					Pemenuhan Indikator SPBE
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE: Layanan Internal dan Publik yang Optimal dan Efisien											
1	Tata Kelola										
	A	Kebijakan SPBE									
		1	Kebijakan Arsitektur SPBE								
		-	Reviu dan tindak lanjut kebijakan arsitektur SPBE sesuai dengan peraturan pusat/hasil assesment SPBE yang terbaru			Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Berkelanjutan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
		2	Kebijakan Peta Rencana SPBE								
		-	Reviu dan tindak lanjut kebijakan peta rencana			Dinas Perhubungan,	Berkelanjutan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan

No	Project/Activities			Koordinator UIC	Baseline	Target					Pemenuhan Indikator SPBE
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
			SPBE sesuai dengan peraturan pusat/hasil assesment SPBE yang terbaru	Komunikasi dan Informatika							
		3	Kebijakan Manajemen Data								
		-	Reviu dan tindak lanjut kebijakan manajemen data sesuai dengan peraturan pusat/hasil assesment SPBE yang terbaru	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Berkelanjutan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
		4	Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE								
		-	Reviu dan tindak lanjut pembangunan aplikasi SPBE	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Berkelanjutan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
		5	Kebijakan Pusat Data								
		-	Reviu dan tindak lanjut pengelolaan pusat data	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Berkelanjutan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
		6	Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah								
		-	Reviu dan tindak lanjut pengelolaan jaringan intra pemerintah	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Berkelanjutan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
		7	Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat								
		-	Reviu dan tindak lanjut kebijakan penggunaan sistem penghubung layanan pemerintah	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Berkelanjutan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
		8	Kebijakan internal Manajemen Keamanan Informasi								
		-	Reviu dan tindak lanjut kebijakan internal manajemen keamanan informasi	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Berkelanjutan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
		9	Kebijakan Internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi								
		-	Reviu dan tindak lanjut kebijakan audit teknologi informasi dan komunikasi	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan	Berkelanjutan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	

No	Project/Activities				Koordinator UIC	Baseline	Target					Pemenuhan Indikator SPBE
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	
					Informatika							
		10	Kebijakan Tim koordinasi SPBE									
			-	Reviu dan tindak lanjut kebijakan tim koordinasi SPBE	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Berkelanjutan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	B	Pembentukan Komite/Forum SPBE										
		1	Evaluasi Perbup / Sk Tim Koordinasi SPBE		Tim Koordinasi SPBE	Berkelanjutan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Indikator 19
		2	Evaluasi Perbup / Sk Komite Forum Satu Data		Tim Koordinasi SPBE	Berkelanjutan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
		3	Evaluasi Perbup / SK Komite Manajemen Risiko		Tim Koordinasi SPBE	Berkelanjutan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
		4	Evaluasi Perbup / Sk Komite Manajemen Perubahan		Tim Koordinasi SPBE	Berkelanjutan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
		5	Evaluasi Perbup / Sk Komite Manajemen Pengetahuan		Tim Koordinasi SPBE	Berkelanjutan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
		6	Evaluasi Perbup / Sk Pokja Manajemen Layanan		Tim Koordinasi SPBE	Berkelanjutan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
		7	Evaluasi Perbup / Sk Pokja Manajemen Keamanan Informasi		Tim Koordinasi SPBE	Berkelanjutan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	C	Kolaborasi SPBE										
		1	Pelaksanaan kolaborasi penerapan RB tematik digitalisasi / SPBE		Tim Koordinasi SPBE	Berkelanjutan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	Indikator 20
		2	Evaluasi pelaksanaan penerapan RB tematik digitalisasi / Indeks SPBE Internal		Tim Koordinasi SPBE	Berkelanjutan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	D	Evaluasi dan Revisi Tata Kelola SPBE										
		1	Evaluasi dan Revisi Arsitektur dan Peta Rencana SPBE		Tim Koordinasi SPBE	Dalam Proses	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Indikator 11-12
		2	Monitoring dan Evaluasi Rencana Anggaran TIK		Tim Koordinasi SPBE	Belum Dilakukan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Indikator 13
		3	Evaluasi dan Revisi Prose Bisnis Pemerintah Daerah		Tim Koordinasi SPBE	Belum Dilakukan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Indikator 14
		4	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Aplikasi Pemerintah Daerah		Tim Koordinasi SPBE	Belum Dilakukan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Indikator 15
		5	Monitoring dan Evaluasi Tim Koordinasi SPBE		Tim Koordinasi SPBE	Belum Dilakukan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Indikator 19

No	Project/Activities				Koordinator UIC	Baseline	Target					Pemenuhan Indikator SPBE
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	
2	Manajemen											
	A	Penyusunan Pedoman Manajemen										
		1	Pedoman Manajemen Risiko									
		-	Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi risiko SPBE oleh inspektorat			Inspektorat	Berkelanjutan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Indikator 21
		-	Penetapan konteks risiko SPBE			Inspektorat	Berkelanjutan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
		-	Penyusunan identifikasi risiko SPBE dengan menguraikan jenis risiko SPBE, penyebab, kategori, dampak, dan area dampak			Inspektorat	Berkelanjutan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
		-	Penyusunan analisis risiko SPBE dengan menguraikan kemungkinan dan dampak yang ditimbulkan seta level risiko SPBE & penyusunan evaluasi risiko SPBE			Inspektorat	Berkelanjutan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
		-	Penyusunan rencana penanganan risiko SPBE dengan menguraikan opsi, rencana aksi penanganan risiko, output, jadwal implementasi, dan penanggung jawabnya			Inspektorat	Berkelanjutan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
		-	Penyusunan laporan evaluasi manajemen risiko SPBE secara periodik dan insidental			Inspektorat	Berkelanjutan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
		2	Pedoman Manajemen Data									
		-	Pembaharuan arsitektur data			Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Berkelanjutan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Indikator 23
		-	Pengumpulan data sektoral di masing-masing unit kerja			Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Berkelanjutan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
		-	Pemeriksaan pemenuhan data sektoral			Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Berkelanjutan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
		-	Penyebarluasan data sektoral			Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian	Berkelanjutan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	

No	Project/Activities				Koordinator UIC	Baseline	Target					Pemenuhan Indikator SPBE
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	
					dan Pengembangan Daerah							
			-	Pembaruan data sektoral secara berkala	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Berkelanjutan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
			-	Penyimpanan data pada portal open data	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Berkelanjutan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
			-	Penjaminan kualitas data meliputi daftar data, data prioritas, dan jadwal pemutakhiran data	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Berkelanjutan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
			3	Pedoman Manajemen Layanan TIK								
			-	Identifikasi dan Analisa Layanan Pemerintah Daerah	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Belum dilakukan	1 Dokumen					Indikator 28
			-	Penyusunan Dokumen Manajemen Layanan Pemerintah Daerah	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Belum dilakukan	1 Dokumen					
			-	Evaluasi dan Perbaiki Layanan Pemerintah Daerah	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Berkelanjutan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
			4	Pedoman Manajemen SDM TIK								
			-	Pengadaan SDM Developer Internal Pemerintah Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Berkelanjutan	13 SDM	15 SDM	21 SDM	21 SDM	21 SDM	Indikator 25
			-	Analisis Jabatan dan Analisa Beban Kerja Jabatan TIK	Bagian Organisasi	Berkelanjutan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
			-	Analisis Kebutuhan Pelatihan SDM TIK	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Berkelanjutan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
			-	Pelatihan SDM TIK	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Berkelanjutan	30 SDM	40 SDM	50 SDM	50 SDM	50 SDM	

No	Project/Activities				Koordinator UIC	Baseline	Target					Pemenuhan Indikator SPBE
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	
			-	Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi SDM TIK	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Berkelanjutan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
		5	Pedoman Manajemen Aset TIK									
			-	Penyusunan SOP perencanaan aset TIK	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	Belum dilakukan	1 Dokumen					Indikator 24
			-	Penyusunan SOP pengadaan aset TIK	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	Belum dilakukan	1 Dokumen					
			-	Penyusunan SOP atas penghapusan aset TIK	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	Belum dilakukan	1 Dokumen					
			-	Menginventarisasi aset SPBE (aplikasi dan infrastruktur)	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	Belum dilakukan	1 Dokumen					
			-	Evaluasi dan perbaikan manajemen aset TIK	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	Berkelanjutan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
		6	Pedoman Manajemen Pengetahuan									
			-	Pembentukan komite manajemen pengetahuan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Belum dilakukan	1 Kegiatan					Indikator 26
			-	Penyusunan pedoman manajemen pengetahuan (kebijakan dan SOP)	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Belum dilakukan	1 Dokumen					
			-	Pelaksanaan manajemen pengetahuan dengan aplikasi	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Berkelanjutan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
			-	Evaluasi dan perbaikan manajemen pengetahuan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Berkelanjutan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
		7	Pedoman Manajemen Perubahan									
			-	Pembentukan komite manajemen perubahan	Bagian Organisasi	Belum dilakukan	1 Kegiatan					Indikator 27
			-	Penyusunan pedoman / SOP manajemen perubahan SPBE	Bagian Organisasi	Belum dilakukan	1 Dokumen					

No	Project/Activities			Koordinator UIC	Baseline	Target					Pemenuhan Indikator SPBE
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		-	Penyusunan form log manajemen perubahan	Bagian Organisasi	Belum dilakukan	1 Dokumen					
		-	Pelaksanaan manajemen perubahan SPBE	Bagian Organisasi	Berkelanjutan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
		-	Evaluasi dan perbaikan manajemen perubahan	Bagian Organisasi	Berkelanjutan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	8	Pedoman Manajemen Keamanan Informasi									
		-	Pembentukan tim keamanan informasi	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Belum dilakukan	1 Kegiatan					Indikator 22
		-	Penyusunan SOP keamanan informasi mengacu pada Perban BSSN No. 4 Tahun 2021	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Belum dilakukan	1 Kegiatan					
		-	Membuat postingan keamanan informasi pada media informasi	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Berkelanjutan	1 Bulan Sekali	1 Bulan Sekali	1 Bulan Sekali	1 Bulan Sekali	1 Bulan Sekali	
		-	Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi keamanan SPBE	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Berkelanjutan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
		-	Evaluasi dan perbaikan manajemen keamanan informasi	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Berkelanjutan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
3	Layanan										
	A	Optimalisasi Layanan RB Tematik									
		1	Layanan Kemiskinan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belum dilakukan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
		2	Layanan Investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Belum dilakukan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
	B	Pengembangan Layanan Prioritas									
		1	Layanan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan	Belum dilakukan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			

No	Project/Activities			Koordinator UIC	Baseline	Target					Pemenuhan Indikator SPBE
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
				Kebudayaan							
		2	Layanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Belum dilakukan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
		3	Layanan Bantuan Sosial	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Belum dilakukan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
		4	Layanan Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Belum dilakukan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
		5	Layanan Transaksi Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	Belum dilakukan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
		6	Layanan Administrasi Pemerintah	Seluruh Perangkat Daerah	Belum dilakukan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
		7	Layanan Portal Layanan Publik	Seluruh Perangkat Daerah	Belum dilakukan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
		8	Layanan Satu Data Indonesia	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Belum dilakukan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
		9	Layanan Kepolisian	Satuan Polisi Pamong Praja	Belum dilakukan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
	C	Pengembangan Portal Layanan Publik									
		1	Analisis Kebutuhan Layanan Publik	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Berkelanjutan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan	
		2	Pengembangan Modul Layanan Publik	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Berkelanjutan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
		3	Monitoring dan Evaluasi Layanan Publik	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Berkelanjutan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	D	Survey Penggunaan Layanan									
		1	Survey Kepuasan Layanan Internal	Bagian Organisasi	Belum dilakukan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			Indikator 15, 32-47
		2	Survey Kepuasan Layanan Publik	Bagian Organisasi	Belum dilakukan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			

No	Project/Activities			Koordinator UIC	Baseline	Target					Pemenuhan Indikator SPBE
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
4	Aplikasi										
	A	Pengembangan Aplikasi									
		1	Pengembangan SIMPEG		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Belum dilakukan		1 Kegiatan			
		2	Pengembangan e-Talenta		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Belum dilakukan		1 Kegiatan			
		3	Pengembangan e-SKM		Bagian Organisasi	Belum dilakukan		1 Kegiatan			
		4	TKKSD		Bagian Tata Pemerintahan	Belum dilakukan		1 Kegiatan			
		5	e-ASET Setda		Bagian Umum, Kearsipan dan Perpustakaan	Belum dilakukan		1 Kegiatan			
		6	SIPASUM		Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	Belum dilakukan		1 Kegiatan			
		7	PPDB Online		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belum dilakukan		1 Kegiatan			
		8	Pengembangan PELUKAN		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Belum dilakukan		1 Kegiatan			
		9	TTE PBB		Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	Belum dilakukan		1 Kegiatan			
		10	Sistem Tata Kelola Hibah		Bagian Kesejahteraan Rakyat	Belum dilakukan		1 Kegiatan			
		11	Pengembangan VMS		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Belum dilakukan		1 Kegiatan			

No	Project/Activities			Koordinator UIC	Baseline	Target					Pemenuhan Indikator SPBE
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		12	SIDAKEP	Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Belum dilakukan		1 Kegiatan				
		13	Pengembangan Sahabat EBEN	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Belum dilakukan		1 Kegiatan				
		14	Pengembangan ADIPATI	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	Belum dilakukan		1 Kegiatan				
		15	Pengembangan APDOL	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	Belum dilakukan		1 Kegiatan				
		16	Geopark Galunggung	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Belum dilakukan		1 Kegiatan				
		17	Sistem Informasi Pembuatan Produk Hukum	Bagian Hukum	Belum dilakukan		1 Kegiatan				
		18	JDIH DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Belum dilakukan		1 Kegiatan				
		19	Pengembangan SATUDATA Kesehatan Terintegrasi	Dinas Kesehatan	Belum dilakukan		1 Kegiatan				
		20	SIMADU KAB TASIK	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Belum dilakukan			1 Kegiatan			
		21	IKM Terintegrasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Belum dilakukan			1 Kegiatan			
		22	SIKW	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Belum dilakukan			1 Kegiatan			
		23	SISPARPERAGA	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Belum dilakukan			1 Kegiatan			
		24	SI JANTAN	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	Belum dilakukan			1 Kegiatan			

No	Project/Activities			Koordinator UIC	Baseline	Target					Pemenuhan Indikator SPBE
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		25	SIIPAH	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	Belum dilakukan			1 Kegiatan			
		26	Portal Layanan Publik Kabupaten Tasikmalaya	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Belum dilakukan			1 Kegiatan			
		27	GEOTASIK	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Belum dilakukan			1 Kegiatan			
		28	Pengembangan SIMWAS	Inspektorat Daerah	Belum dilakukan			1 Kegiatan			
		29	Komunikasi Pimpinan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Belum dilakukan				1 Kegiatan		
		30	Sistem Layanan Administrasi Pimpinan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Belum dilakukan				1 Kegiatan		
		31	e-Office	Bagian Tata Usaha	Belum dilakukan				1 Kegiatan		
		32	SISAPTA POL PP	Satuan Polisi Pamong Praja	Belum dilakukan				1 Kegiatan		
	B	Pengembangan sistem penghubung layanan pemerintah (api gateway)									
		1	Penyusunan Analisis Kebutuhan API Gateway	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Berkelanjutan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Indikator 18
		2	Pengembangan dan Pengujian API Gateway	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Berkelanjutan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
		3	Dokumentasi API Gateway	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Berkelanjutan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	C	Pengembangan portal data dan dashboard (big data)									
		1	Pengembangan Report builder, Data mining dan warehousing, Integrasi back office application	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan	Berkelanjutan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	

No	Project/Activities			Koordinator UIC	Baseline	Target					Pemenuhan Indikator SPBE
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
				Informatika							
	D	Pemeliharaan aplikasi									
		1	Pemantauan kesehatan dan kinerja dari server aplikasi (web server, database server, application server) menggunakan aplikasi pemantauan seperti MRTG, LibreNMS, dan lain - lain.	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Berkelanjutan	Menyesuaikan	Menyesuaikan	Menyesuaikan	Menyesuaikan	Menyesuaikan	Indikator 15
		2	Melakukan perbaikan pada saat ditemukan error/bug	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Berkelanjutan	Menyesuaikan	Menyesuaikan	Menyesuaikan	Menyesuaikan	Menyesuaikan	
		3	Mempertahankan agar sistem tetap berjalan dengan optimal	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Berkelanjutan	Menyesuaikan	Menyesuaikan	Menyesuaikan	Menyesuaikan	Menyesuaikan	
		4	Melakukan upgrade patch keamanan, maupun patch performa sistem	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Berkelanjutan	Menyesuaikan	Menyesuaikan	Menyesuaikan	Menyesuaikan	Menyesuaikan	
5	Infrastruktur										
	A	Peningkatan Kapasitas Ruangan dan Perangkat Pendukung Ruang Server									
		1	Asesmen kondisi saat ini ruangan dan perangkat pendukung ruang server (sistem pendingin ruangan, sistem pemadam kebakaran, ups, genset)	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Belum dilakukan	1 Kegiatan					Indikator 16
		2	Identifikasi rencana pengembangan aplikasi/sistem informasi ke depan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Belum dilakukan	1 Kegiatan					
		3	Penyusunan rencana pengembangan ruangan dan perangkat pendukung ruang server	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Belum dilakukan	1 Kegiatan					
		4	Pelaksanaan pengembangan ruangan dan perangkat pendukung ruang server	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Belum dilakukan		1 Kegiatan	1 Kegiatan			
	B	Penyusunan Rencana Kapasitas (Capacity Plan)									

No	Project/Activities			Koordinator UIC	Baseline	Target					Pemenuhan Indikator SPBE
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		Infrastruktur Utama Server dan Storage									
		1	Asesmen kondisi utilisasi dan kinerja server dan storage saat ini	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Belum dilakukan	1 Kegiatan					Indikator 16
		2	Asesmen kondisi server dan jaringan untuk memastikan ketersediaan, kehandalan layanan TIK	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Belum dilakukan	1 Kegiatan					
		3	Penyusunan rencana kapasitas server dan storage untuk 4 tahun ke depan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Belum dilakukan	1 Kegiatan					
		4	Penyediaan Server virtualisasi beserta lisensinya secara colocation untuk mendukung ketersediaan tinggi layanan TIK	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Belum dilakukan	1 Kegiatan					
		5	Identifikasi kebutuhan pengembangan aplikasi/sistem informasi	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Belum dilakukan	1 Kegiatan					
	C	Peningkatan Kapasitas Pusat Pemulihan Bencana									
		1	Asesmen kondisi utilisasi dan kinerja server dan storage di pusat pemulihan bencana	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Belum dilakukan	1 Kegiatan					Indikator 16
		2	Identifikasi aplikasi/sistem informasi yang sudah atau belum dicadangkan di pusat pemulihan bencana	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Belum dilakukan	1 Kegiatan					
		3	Penyusunan kebutuhan server dan storage untuk aplikasi/sistem informasi yang belum dicadangkan di pusat pemulihan bencana	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Belum dilakukan	1 Dokumen					
		4	Pengadaan server, storage, perangkat lunak, perangkat jaringan dan lain - lain untuk cadangan aplikasi/sistem informasi di pusat pemulihan bencana	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Belum dilakukan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				
	D	Uji Coba Pemulihan Bencana Secara Periodik									
		1	Penyusunan dokumen rencana kontinuitas bisnis	Dinas Perhubungan,	Belum dilakukan	1 Dokumen					Indikator 16

No	Project/Activities			Koordinator UIC	Baseline	Target					Pemenuhan Indikator SPBE
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
			(business continuity plan) dan rencana pemulihan bencana (disaster recovery plan)	Komunikasi dan Informatika							
		2	Penyusunan skenario uji coba pemulihan bencana	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Belum dilakukan	1 Kegiatan					
		3	Uji coba pemulihan bencana	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Berkelanjutan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
		4	Evaluasi hasil uji coba pemulihan bencana	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Berkelanjutan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	E	Peningkatan Kapasitas dan Keandalan Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah									
		1	Asesmen kondisi saat ini utilisasi kapasitas dan kinerja infrastruktur jaringan intra pemerintah	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Belum dilakukan	1 Kegiatan					Indikator 17
		2	Identifikasi kendala atau permasalahan yang terjadi	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Belum dilakukan	1 Kegiatan					
		3	Identifikasi kebutuhan layanan jaringan intra pemerintah 4 tahun ke depan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Belum dilakukan	1 Kegiatan					
		4	Penyusunan rencana pengembangan kapasitas dan kehandalan jaringan intra pemerintah	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Belum dilakukan	1 Kegiatan					
		5	Pelaksanaan pengembangan kapasitas dan kehandalan jaringan intra pemerintah	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Berkelanjutan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
		6	Evaluasi pelaksanaan pengembangan kapasitas dan kehandalan jaringan intra pemerintah	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Berkelanjutan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	F	Pemeliharaan Jaringan Dalam Kota Interkoneksi OPD/UPT									

No	Project/Activities			Koordinator UIC	Baseline	Target					Pemenuhan Indikator SPBE
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		1	Perangkat daerah / UPT terkoneksi JIP diksominfo	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Belum	1 Kegiatan					
		2	Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan antar Perangkat daerah / UPT	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Berkelanjutan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
		3	Terpenuhi SLA	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Berkelanjutan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	G	Pengembangan Infrastruktur Jaringan Data Nirkabel (WiFi) Terintegrasi									
		1	Asesmen kondisi infrastruktur jaringan data nirkabel saat ini	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Belum dilakukan	1 Kegiatan					Indikator 17
		2	Identifikasi kendala, permasalahan dan isu keamanan jaringan data nirkabel	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Belum dilakukan	1 Kegiatan					
		3	Identifikasi target pengembangan infrastruktur jaringan data nirkabel (implementasi protokol WPA2-enterprise, fitur roaming, dll)	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Belum dilakukan	1 Kegiatan					
		4	Penyusunan rencana pengembangan dan kebutuhan anggaran infrastruktur jaringan data nirkabel	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Belum dilakukan	1 Dokumen					
		5	Pelaksanaan pengembangan infrastruktur jaringan data nirkabel	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Berkelanjutan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
		6	Evaluasi pelaksanaan pengembangan infrastruktur jaringan data nirkabel	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Berkelanjutan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	H	Pembangunan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)									
		1	Integrasi Data	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan	Berkelanjutan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	

No	Project/Activities			Koordinator UIC	Baseline	Target					Pemenuhan Indikator SPBE
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
				Informatika							
		2	Integrasi Presentasi	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Berkelanjutan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
		3	Integrasi Fungsional	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Berkelanjutan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
6	Keamanan										
	A	Sertifikasi Standar Keamanan Informasi (Indeks KAMI/ ISO 27001)									
		1	Identifikasi ruang lingkup untuk standar keamanan informasi (indeks KAMI/ISO 27001)	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Belum dilakukan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan	Indikator 22
		2	Pendampingan sertifikasi ISO 27001 atau indeks KAMI	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Belum dilakukan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan	
		3	Sertifikasi ISO 27001 atau indeks KAMI	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Belum dilakukan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan	
	B	Penilaian Kerentanan dan Pengujian Penetrasi									
		1	Identifikasi ruang lingkup penilaian kerentanan dan pengujian penetrasi	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Belum dilakukan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Indikator 22
		2	Pelaksanaan penilaian kerentanan dan pengujian penetrasi	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Belum dilakukan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
		3	Evaluasi hasil pelaksanaan penilaian kerentanan dan pengujian penetrasi	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Belum dilakukan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	

No	Project/Activities			Koordinator UIC	Baseline	Target					Pemenuhan Indikator SPBE
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
7	Audit TIK										
	A	Pelaksanaan Audit TIK									
		1	Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE								
			-	Pembentukan tim audit infrastruktur SPBE	Inspektorat	Belum dilakukan	1 Kegiatan				Indikator 29
			-	Pelaksanaan audit internal infrastruktur SPBE	Inspektorat	Belum dilakukan	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	
			-	Pelaksanaan audit eksternal infrastruktur SPBE	Inspektorat	Belum dilakukan	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	
			-	Evaluasi hasil pelaksanaan audit infrastruktur SPBE	Inspektorat	Belum dilakukan	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	
			-	Perbaikan infrastruktur SPBE sesuai rekomendasi hasil audit	Inspektorat	Berkelanjutan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
		2	Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE								
			-	Pembentukan tim audit aplikasi SPBE	Inspektorat	Belum dilakukan	1 Kegiatan				Indikator 30
			-	Pelaksanaan audit internal aplikasi SPBE	Inspektorat	Belum dilakukan	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	
			-	Pelaksanaan audit eksternal aplikasi SPBE	Inspektorat	Belum dilakukan			1 Kegiatan	1 Kegiatan	
			-	Evaluasi hasil pelaksanaan audit aplikasi SPBE	Inspektorat	Belum dilakukan	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	
			-	Perbaikan aplikasi SPBE sesuai rekomendasi hasil audit	Inspektorat	Berkelanjutan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
		3	Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE								
			-	Pembentukan tim audit keamanan SPBE	Inspektorat	Belum dilakukan	1 Kegiatan				Indikator 31
			-	Pelaksanaan audit internal keamanan SPBE	Inspektorat	Belum dilakukan	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	
			-	Pelaksanaan audit eksternal keamanan SPBE	Inspektorat	Belum dilakukan	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	
			-	Evaluasi hasil pelaksanaan audit keamanan SPBE	Inspektorat	Belum dilakukan	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	
			-	Perbaikan keamanan SPBE sesuai rekomendasi hasil audit	Inspektorat	Berkelanjutan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	

Bab IV Penutup

Laporan Peta Rencana SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) ini disusun guna memberikan rencana yang perlu diimplementasikan di Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Kondisi yang disampaikan dalam laporan ini diperoleh dari proses tabulasi dan analisa kondisi target yang selanjutnya diterjemahkan dalam rencana program kerja terkait SPBE.

Laporan Peta Rencana SPBE ini akan dijadikan sebagai landasan dalam implementasi layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sesuai bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya selama 5 (lima) tahun mendatang dan juga substansi yang terdapat dalam peta rencana ini perlu dituangkan ke dalam dokumen Rencana Kinerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun berikutnya.



Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya

DOKUMEN INI MERUPAKAN DOKUMEN YANG SENANTIASA DAPAT BERUBAH (*LIVING DOCUMENT*) SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN PROSES BISNIS DAN TEKNOLOGI SEHINGGA PERLU DILAKUKAN REVIEW SEKURANG-KURANGNYA SETAHUN SEKALI (*ANNUAL REVIEW*).

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : PROGRAM KERJA TIM KOORDINASI SPBE



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

PROGRAM KERJA TIM KOORDINASI SPBE

TAHUN 2025



NO.	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN												Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
1	Penyusunan Perubahan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi SPBE													
2	Rapat Persiapan Evaluasi SPBE (Penilaian Mandiri)													
3	Koordinasi Pemantauan Penilaian Mandiri SPBE dengan seluruh OPD													
4	Rapat Finalisasi Hasil Penilaian Mandiri SPBE dengan seluruh OPD													
5	Koordinasi Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri SPBE kepada Kementerian PAN RB													
6	Koordinasi Pemantauan Hasil Penilaian Interviu dan Kementerian PAN RB													
7	Koordinasi Pemantauan Hasil Penilaian Visitasi dan Kementerian PAN RB													
8	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi SPBE													
9	Kelompok kerja Transformasi Manajemen													

LAMPIRAN 1 : PROGRAM KERJA TIM KOORDINASI SPBE



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

PROGRAM KERJA TIM KOORDINASI SPBE

TAHUN 2025



NO.	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN												Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
	Sumber Daya Manusia													
	Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja terhadap jabatan TIK													
	Analisis Peta Jabatan													
	Rencana atau laporan pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM TIK													
	Analisis kebutuhan pelatihan bagi SDM TIK													
10	Kelompok Kerja Transformasi Proses Bisnis Digital dan Manajemen Perubahan													
	Evaluasi dan Penyesuaian Peta Proses Bisnis													
	Evaluasi Digitalisasi Layanan													
	Penyusunan Log Manajemen Perubahan													
	Penyusunan SOP Manajemen Perubahan SPBE													
	Pelaksanaan Manajemen Perubahan SPBE													

LAMPIRAN 1 : PROGRAM KERJA TIM KOORDINASI SPBE



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

PROGRAM KERJA TIM KOORDINASI SPBE

TAHUN 2025



NO.	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN												Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
11	Kelompok Kerja Penganggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik													
	Evaluasi Substansi Peta Rencana SPBE dalam RKA													
	Monitoring dan Clearance Usulan Pengadaan SPBE													
12	Kelompok Kerja Manajemen Layanan, Data, Aplikasi, Infrastruktur SPBE													
	Pembentukan SK Tim Helpdesk													
	Pemanfaatan Ticketing System													
	Evaluasi & Perbaikan Kinerja Tim Helpdesk													
	Penyusunan dokumen pedoman Manajemen Data													
	Penyusunan Daftar Data													
	Pengumpulan data sektoral dimasing-masing OPD													
	Pemeriksaan pemenuhan data sektoral													

LAMPIRAN 1 : PROGRAM KERJA TIM KOORDINASI SPBE



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

PROGRAM KERJA TIM KOORDINASI SPBE

TAHUN 2025



NO.	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN												Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
	Penyebarluasan data sektoral													
	Pembaruan Data Sektoral secara berkala													
	Penyimpanan data pada Portal Open Data													
	Penjaminan kualitas data meliputi daftar data, data prioritas, dan jadwal pemutakhiran data													
	Evaluasi Penerapan Aplikasi													
	Optimalisasi Penerapan Aplikasi													
	Evaluasi Kapabilitas Infrastruktur													
	Penyusunan Capacity Plan Infrastruktur													
	Pengembangan Kapasitas Infrastruktur													
13	Kelompok Kerja Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik													
	Penyusunan SK Tim Audit Internal													
	Penyusunan Kebijakan Audit TIK													
	Pelaksanaan Audit Internal													

LAMPIRAN 1 : PROGRAM KERJA TIM KOORDINASI SPBE



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

PROGRAM KERJA TIM KOORDINASI SPBE

TAHUN 2025



NO.	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN												Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
	Pelaksanaan Audit Eksternal													
	Penyusunan SK dan Pembentukan SK Tim Manajemen Risiko													
	Penyusunan dokumen pedoman Penyusunan dokumen pedoman Manajemen Risiko SPBE yang berisi kerangka manajemen risiko SPBE, proses manajemen risiko SPBE, struktur manajemen risiko SPBE, budaya risiko SPBE													
	Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan pelaksanaan Manajemen Risiko													
	Penerapan manajemen risiko melalui komunikasi dan konsultasi melalui rapat berkala, rapat insidental, FGD													
	Penetapan konteks risiko SPBE													

LAMPIRAN 1 : PROGRAM KERJA TIM KOORDINASI SPBE



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

PROGRAM KERJA TIM KOORDINASI SPBE

TAHUN 2025



NO.	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN												Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
	Penyusunan identifikasi risiko SPBE dengan menguraikan jenis risiko SPBE, penyebab, kategori, dampak, dan area dampak													
	Penyusunan analisis Risiko SPBE dengan menguraikan kemungkinan dan dampak yang ditimbulkan seta level risiko SPBE & Penyusunan evaluasi Risiko SPBE													
	Penyusunan rencana penanganan Risiko SPBE dengan menguraikan opsi, rencana aksi penanganan risiko, output, jadwal implementasi, dan penanggung jawabnya													
	Penyusunan laporan Manajemen Risiko SPBE secara periodik dan insidental													
	Penyusunan dan penetapan kebijakan Manajemen Risiko SPBE													
	Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan,													

LAMPIRAN 1 : PROGRAM KERJA TIM KOORDINASI SPBE



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

PROGRAM KERJA TIM KOORDINASI SPBE

TAHUN 2025



NO.	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN												Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
	bimbingan, dan supervisi risiko SPBE													
14	Kelompok Kerja Manajemen Pengetahuan													
	Penyusunan Pedoman Manajemen Pengetahuan (Kebijakan dan SOP)													
	Penyusunan SK dan Pembentukan Tim Komite Manajemen Pengetahuan													
	Optimalisasi Aplikasi Manajemen Pengetahuan													
	Pelaksanaan Manajemen Pengetahuan													
	Evaluasi dan Perbaikan Manajemen Pengetahuan													
15	Kelompok Kerja Perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik													
	Menginventarisasi aset SPBE (data, informasi, aplikasi, dan infrastruktur)													
	Penyusunan dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE													

LAMPIRAN 1 : PROGRAM KERJA TIM KOORDINASI SPBE



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

PROGRAM KERJA TIM KOORDINASI SPBE

TAHUN 2025



NO.	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN												Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
	Penyesuaian dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE													
16	Kelompok Kerja Manajemen Keamanan Informasi													
	Penyusunan dokumen pedoman Keamanan Informasi													
	Penyusunan dokumen perencanaan keamanan informasi SPBE yang memuat program kerja berdasarkan kategori risiko SPBE dan target realisasinya													
	Menginventarisasi seluruh aset SPBE (data, informasi, aplikasi, dan infrastruktur), pelaksanaan identifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE, mengukur tingkat keamanan resiko SPBE oleh OPD dengan berpedoman pada dokumen perencanaan keamanan SPBE													

LAMPIRAN 1 : PROGRAM KERJA TIM KOORDINASI SPBE



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

PROGRAM KERJA TIM KOORDINASI SPBE

TAHUN 2025



NO.	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN												Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
	Penyusunan standar teknis dan SOP keamanan SPBE													
	Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi keamanan SPBE													



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

